

**EVALUASI EKONOMI PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
BERSAMA MASYARAKAT DI DESA NGANCAR, KECAMATAN
NGANCAR, KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Oleh :

GESTI ALBANIARTY



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS PERTANIAN

MALANG

2018

**EVALUASI EKONOMI PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
BERSAMA MASYARAKAT DI DESA NGANCAR, KECAMATAN
NGANCAR, KABUPATEN KEDIRI**

Oleh :

GESTI ALBANIARTY

145040101111199

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Pertanian Strata (S-1)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS PERTANIAN

MALANG

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Gesti Albaniarty
NIM : 145040101111199
Program Studi : Agribisnis
Jurusan : Sosial Ekonomi Pertanian
Judul : Evaluasi Ekonomi Program Pengelolaan Hutan Bersama
Masyarakat di Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten
Kediri



Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,

Dr.Ir. Suhartini, MP.

NIP. 196804012008012015

Pembimbing Pendamping,

Rini Mutisari, SP., MP

NIK. 2016099005052001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Sosial Ekonomi
Pertanian,

Mangku Purnomo, SP., M.Si., Ph.D.

NIP. 19770420 200501 1 001



LEMBAR PENGESAHAN

Mengesahkan

MAJELIS PENGUJI

Penguji I,



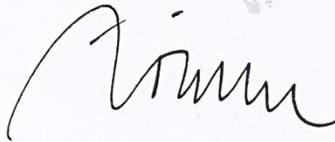
Mas Ayu Ambayoen, SP., M.Si
NIP. 19791216 201504 2 001

Penguji II,



Rini Mutisari, SP., MP
NIK. 2016099005052001

Penguji III,



Dr. Ir. Suhartini, MP.
NIP. 196804012008012015

Tanggal Lulus :



PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa segala bentuk pernyataan dalam skripsi ini merupakan hasil penelitian saya sendiri. Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang dengan jelas ditunjukkan rujukannya dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Malang, Agustus 2018

Gesti Albaniarty



LEMBAR PERUNTUKAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya kepada hamba-Nya terutama untuk penulis. Shalawat serta salam tak lupa dipanjatkan kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya.
2. Kedua orang tua, saudara dan keluarga yang selalu hadir dan mendoakan.
3. Ibu Dr.Ir.Suhartini, MP dan Rini Mutisari, SP., MP selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan saran yang bermanfaat.
4. Ibu Mas Ayu Ambayoan, SP., M.Si selaku dosen penguji yang telah menguji serta memberikan saran perbaikan skripsi.
5. Bapak-bapak pengurus dan anggota LMDH Lancar Jaya yang telah menerima dan membantu mendukung kegiatan penelitian di Desa Ngancar.
6. Bapak-bapak staff UPT IV PHW Dinas Kehutanan yang telah membantu dalam perizinan serta membantu kegiatan penelitian.
7. Bapak Nur Adin selaku Kepala Seksi Perum Perhutani KPH Kediri yang telah membantu dalam kegiatan penelitian.
8. Seluruh staff Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur yang telah membantu perizinan penelitian di Desa Ngancar.
9. Civitas akademika Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang membantu dalam kelancaran pembuatan skripsi ini.
10. Sahabat Sholehah Ridayati dan Cindy Dara Ayu yang telah memberikan dukungan, semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat kos Muslimah Bidadari yaitu Diah Sari Anggraini, Puan dan Diannisa Hadianti yang telah memberikan pengertian serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
12. *My Support System* Abang Helmy Ridho, yang memberikan masukan, saran, semangat serta dukungan tanpa henti selama menyelesaikan skripsi.

RINGKASAN

Gesti Albaniarty. 14504010111199. Evaluasi Ekonomi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Di bawah bimbingan Dr.Ir. Suhartini, MP, sebagai Pembimbing Utama dan Rini Mutisari, SP.,MP, sebagai Pembimbing Pendamping.

Program Pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) merupakan suatu program yang dibentuk akibat terjadinya kerusakan hutan yang setiap tahun semakin meningkat. Kerusakan hutan sebagian besar berada pada hutan yang dekat dengan pemukiman masyarakat. Oleh karena itu, program PHBM melibatkan masyarakat dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Desa Ngancar merupakan salah satu desa yang berpartisipasi pada Program PHBM di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) mengidentifikasi sistem pelaksanaan program PHBM; (2) Menganalisis pendapatan dan kelayakan usahatani dilahan Perum Perhutani; (3) mengidentifikasi peran *stakeholder* pada pengelolaan program PHBM.

Penelitian ini terletak di Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan dua jenis responden yaitu petani sampel dan *key informan*. Metode penarikan sampel menggunakan *purposive random sampling* dan penentuan responden dibagi secara proporsional dari masing-masing komoditas. Komoditas yang di tanam di Desa Ngancar yaitu komoditas nanas, jagung, tomat dan cabai. Total responden yang di teliti sebanyak 40 petani. Sedangkan, *key informan* yang digunakan merupakan stakeholder yang berperan pada kegiatan program PHBM di Desa Ngancar. *Key informan* yang digunakan sebagai sampel yaitu LMDH Lancar Jaya, KPH Kediri, Dinas Kehutanan dan Pemerintah Desa. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis pendapatan usahatani, dan analisis *stakeholder*.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa masih terdapat pelaksanaan Hak dan Kewajiban antara Perum Perhutani dengan LMDH Lancar Jaya yang belum di implementasikan. LMDH Lancar Jaya masih belum memahami mengenai isi hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi. Selain itu, Perum Perhutani juga masih berfokus pada kegiatan produksi sehingga kewajiban dalam melakukan pembinaan pemasaran hasil produksi masyarakat belum dapat dilaksanakan. Pelaksanaan program PHBM di Desa Ngancar memberikan tambahan penghasilan dari hasil *share* dan juga hasil dari usahatani masyarakat.

Usahatani yang dilakukan masyarakat desa hutan berdasarkan pola tanam secara rata-rata dikatakan layak karena memiliki nilai R/C Rasio lebih dari satu. Pelaksanaan Program PHBM melibatkan beberapa *stakeholder* seperti LMDH Lancar Jaya, Perum Perhutani, Pemerintah Desa dan Dinas Kehutanan. Berdasarkan hasil analisis *stakeholder*, diketahui bahwa *stakeholder* yang memiliki kepentingan dan pengaruh tinggi pada program PHBM yaitu LMDH Lancar Jaya dan Perum Perhutani. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program PHBM telah berjalan sesuai dengan ketentuan SK Direksi Perum Perhutani No. 682 tahun 2009.



Saran yang dapat diberikan kepada LMDH Lancar Jaya yaitu lebih rutin dalam melakukan pertemuan dengan anggota LMDH supaya bisa menambah pemahaman mengenai program. Selanjutnya, LMDH Lancar Jaya memberikan peringatan atau sanksi kepada anggota yang melakukan penyimpangan sehingga tidak melakukan hal tersebut. Rekomendasi bagi masyarakat desa hutan yaitu menanam dengan pola tanam tanaman semusim dalam satu tahun sehingga akan memberikan pendapatan yang tinggi. Saran bagi Perhutani yaitu memperhatikan tambahan usaha produktif bagi masyarakat Desa Ngancar. Kemudian, saran untuk peneliti selanjutnya yaitu lebih mengkaji mengenai pelaksanaan program PHBM dengan membandingkan antara pelaksanaan di satu daerah dengan daerah lainnya.



SUMMARY

Gesti Albaniarty. 14504010111199. Economic Evaluation of Community Based Forest Management (CBFM) in Ngancar Village, Ngancar Sub-district, Kediri Regency. Guidance Dr.Ir. Suhartini, MP, as Lecture and Rini Mutisari, SP., MP, as Lecture Counselor.

The Community Based Forest Management (CBFM) is a program that is formed due to the occurrence of forest destruction every year is increasing. Deforestation is largely in forests close to the community. Therefore, the PHBM program involves communities in terms of forest management and utilization. Ngancar Village is one of the participating villages in the PHBM Program in Kediri Regency, East Java. This research was conducted with the purpose are : (1) identifying the system of PHBM program implementation; (2) to analyze income and feasibility of farming in Perum Perhutani; (3) identify the role of stakeholders in the management of the CBFM program.

This research is located in Ngancar Village, Ngancar Sub-district, Kediri Regency, East Java. This study uses two types of respondents ie farmers samples and key informants. Sampling method using purposive random sampling and determination of respondents divided proportionally from each commodity. Commodities planted in Ngancar Village are pineapple, corn, tomato and chilli commodities. Total respondents are in as much as 40 farmers. Meanwhile, the key informant used is a stakeholder who plays a role in the CBFM program in Ngancar Village. Key informants used as samples are LMDH Lancar Jaya, KPH Kediri, Forestry Service and Village Government. Methods of data analysis using descriptive analysis, farm income analysis, and stakeholder analysis.

The result of the research states that there is implementation of Rights and Obligations between Perhutani and LMDH Lancar Jaya which have not been implemented. LMDH Lancar Jaya still does not understand the contents of the rights and obligations that must be done and fulfilled. In addition, Perum Perhutani also still focusing on production activities so that the obligation in conducting the marketing of community products can not be implemented. Implementation of PHBM program in Ngancar Village provides additional income from the share and also the results of community farming.

Farming conducted by forest villagers based on cropping patterns on average is said to be feasible because it has a R / C ratio of more than one. The implementation of the CBFM Program involves several stakeholders such as LMDH Lancar Jaya, Perum Perhutani, the Village Government and the Forestry Service. Based on the results of stakeholder analysis, it is known that stakeholders who have high interests and influence on the PHBM program are LMDH Lancar Jaya and Perum Perhutani. Based on this, it can be concluded that the implementation of the PHBM program has proceeded in accordance with the provisions of the Directors' Decree Perum Perhutani No. 682 of 2009.

The advice that can be given to LMDH Lancar Jaya is that it is more routine to hold meetings with LMDH members so that they can increase their understanding of the program. Furthermore, LMDH Lancar Jaya gives a warning



or sanction to members who make irregularities so they do not do so. Recommendations for forest village communities are planting with annual cropping patterns in one year so that it will provide high income. Advice for Perhutani is to pay attention to additional productive efforts for the Ngancar Village community. Then, the suggestion for the next researcher is to study more about the implementation of the CBFM program by comparing the implementation in one area with the other area.



KATA PENGANTAR

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat merupakan salah satu program pemerintah untuk menjaga dan melestarikan sumberdaya hutan yang ada. Konsep pemberdayaan masyarakat digunakan supaya dengan adanya program ini diharapkan mampu membantu masyarakat desa sekitar hutan meningkatkan pendapatannya dari hasil usahatani yang mereka lakukan di lahan yang disediakan oleh Perum Perhutani. Desa Ngancar memiliki potensi lahan yang baik untuk kegiatan usahatani. Hal tersebut dibuktikan bahwa terdapat beberapa komoditas yang ditanam seperti nanas, jagung, tomat dan cabai. Selain itu, Desa Ngancar juga termasuk dalam salah Desa yang mengikuti Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan program PHBM berdasarkan implementasi hak dan kewajiban yang tertera pada dokumen perjanjian kerjasama antara Perum Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan. implementasi kegiatan PHBM di Desa Ngancar meliputi identifikasi mengenai sistem pelaksanaan program PHBM. Selain itu, peneliti juga menganalisis pendapatan usahatani yang diterima oleh masyarakat desa hutan pada program PHBM.

Malang, Agustus 2018

Penulis

RIWAYAT HIDUP

Gesti Albaniarty, lahir di Pekanbaru, 25 Oktober 1996 di Kota Pekanbaru, Riau. Gesti dilahirkan dan dibesarkan oleh kedua orangtua yang bernama Bapak Gatot Sumardi dan Ibu Muasaroh. Gesti memiliki dua saudara laki-laki dan satu saudara angkat. Sejak kecil Gesti mengenyam pendidikan di Pekanbaru, Riau. Pada tahun 2002 Gesti bersekolah di SD Negeri 008 Limapuluh hingga tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 17 Pekanbaru dari tahun 2008 hingga 2011. Pendidikan selanjutnya menengah atas di SMA Negeri 2 Pekanbaru. Pada tahun 2014 Gesti terpilih melalui jalur undangan untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Brawijaya, Fakultas Pertanian hingga tahun 2018. Selama melakukan perkuliahan Gesti juga pernah menjadi asisten praktikum usahatani dua periode yaitu tahun 2016 dan 2017. Gesti juga mengikuti salah satu organisasi fakultas yaitu LKM Sport Corner sebagai Bendahara Umum II. Gesti juga berkesempatan untuk bekerja di salah satu cafe di Malang sebagai supervisor. Semua kesempatan dan pengalaman yang Gesti dapatkan memberikan semangat bagi Gesti untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

RINGKASAN	
SUMMARY	
KATA PENGANTAR	v
RIWAYAT HIDUP	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Telaah Penelitian Terdahulu	8
2.3 Tinjauan Konsep PHBM	9
2.4 Tinjauan Konsep Usahatani	12
2.4.1 Konsep Analisis Biaya	12
2.4.2 Penerimaan	14
2.4.3 Pendapatan	14
2.4.4 Kelayakan Usahatani	15
2.5. Analisis <i>Stakeholder</i>	15
III. KERANGKA PEMIKIRAN	
3.1. Kerangka Pemikiran Teoritis	18
3.2. Hipotesis	21
3.3. Batasan Masalah	21
3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	21
IV. METODE PENELITIAN	
4.1. Penentuan Lokasi Penelitian	24
4.2. Metode Penarikan Sampel dan Penentuan Responden	24
4.3. Metode Pengumpulan Data	24
4.4. Metode Analisis Data	25
4.4.1 Analisis Deskriptif	25
4.4.2 Analisis Usahatani	26
4.4.3 Analisis <i>Stakeholder</i>	28
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1. Gambaran Umum	24
5.1.1 Kesatuan Pangkuan Hutan (KPH) Kediri	24
5.1.2 Demografi Desa Ngancar	29
5.1.3 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Lancar Jaya	30



5.2. Karakteristik Responden	33
5.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Usia.....	33
5.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	34
5.2.3 Luas Garapan Lahan	34
5.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Usahatani ..	35
5.3. Pelaksanaan Program PHBM di Desa Ngancar	36
5.3.1 Perencanaan Program PHBM di Desa Ngancar	36
5.3.2 Kegiatan Produksi pada Program PHBM di Desa Ngancar	39
5.3.3 Hak dan Kewajiban pada Program PHBM di Desa Ngancar	39
5.4. Analisis Usahatani Desa Ngancar	46
5.4.1 Analisis Pendapatan Usahatani	48
5.4.2 Kelayakan Usahatani	50
5.5. Analisis <i>Stakeholder</i> PHBM di Desa Ngancar	50
5.5.1 Identifikasi Pengaruh dan Kepentingan <i>Stakeholder</i>	51
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan.....	52
6.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57



DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Luas Hak Pangkuan Desa Ngancar 2014-201 4	4
2.	Luas BKPH pada KPH Kediri 28	28
3.	Data Karakteristik Desa Ngancar 30	30
4.	Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Usia 32	32
5.	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 33	33
6.	Karakteristik Responden Berdasarkan Luas Lahan 33	33
7.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Usahatani 34	34
8.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban PHBM di Desa Ngancar..... 40	40
9.	Kesimpulan Pelaksanaan Program PHBM di Desa Ngancar... 42	42
10.	Analisis Biaya Produksi Berdasarkan Pola Tanam pada Program PHBM 46	46
11.	Analisis Usahatani Produksi Berdasarkan Pola Tanam pada Program PHBM..... 47	47
12.	Analisis Pendapatan Produksi Berdasarkan Pola Tanam pada Program PHBM 48	48
13.	Analisis R/C Rasio Produksi Berdasarkan Pola Tanam pada Program PHBM..... 49	49
14.	Penilaian <i>Stakeholder</i> berdasarkan kepentingan dan pengaruh 51	51

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
1.	Kurva <i>Fix Cost</i>	13
2.	Kurva <i>Variabel Cost</i>	13
3.	Kurva <i>Total Cost</i>	14
4.	Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder.....	17
5.	Kerangka Pemikiran Evaluasi Ekonomi pada Program PHBM di Desa Ngancar	19
6.	Peta Desa Ngancar	29
7.	Struktur Desa Ngancar	31
8.	Pemetaan Stakeholder Berdasarkan Tingkat Kepentingan dan Pengaruh	51



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Teks	Halaman
1.	Kuesioner Analisis Usahatani	60
2.	Kuesioner Analisis Stakeholder	64
3.	Karakteristik Responden	72
4.	Analisis Pendapatan Pola Tanam Nanas	73
5.	Analisis Pendapatan Pola Tanam Jagung, Cabai, Jagung	73
6.	Analisis Pendapatan Pola Tanam Jagung, Tomat dan Cabai ...	74
7.	Analisis Pendapatan Pola Tanam Jagung, Tomat, Jagung	75
8.	Analisis Pendapatan Pola Tanam Jagung dan Nanas	75
9.	Analisis Pendapatan Pola Tanam Jagung dan Cabai	75
10.	Analisis Pendapatan Pola Tanam Cabai dan Nanas	76
11.	Analisis Pendapatan Pola Tanam Cabai, Jagung, Cabai	76
12.	Analisis Pendapatan Pola Tanam Tomat, Jagung, Tomat	76
13.	Analisis Pendapatan Pola Tanam Tomat dan Nanas	77
14.	Hasil Analisis Stakeholder Berdasarkan Tingkat Kepentingan	78
15.	Hasil Analisis Stakeholder Berdasarkan Tingkat Pengaruh	78
16.	Dokumentasi	79

I.PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (2017) luas hutan di Indonesia sebesar 133 juta hektar yang tersisa dan sekitar 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya. Penyusutan hutan Indonesia setiap tahunnya disebabkan oleh alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian atau pemukiman untuk mendukung kehidupan masyarakat. Peran masyarakat desa hutan terhadap kegiatan alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan mereka dalam menjaga kelestarian hutan dan didorong oleh kondisi sosial dan ekonomi (Soemarno,2004).

Menurut Puspita (2016) rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan hutan disebabkan karena masyarakat kurang peduli dalam kelestarian sumberdaya hutan. Apabila masyarakat desa sekitar hutan peduli dan mampu melatih kemampuannya dalam pemanfaatan sumberdaya hutan dengan baik, maka kerusakan hutan maupun gangguan hutan tidak akan terjadi. Fenomena ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah dalam upaya kelestarian lingkungan hutan.

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan salah satu program yang dibuat oleh Pemerintah. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan suatu program penyusunan rencana, pengelolaan, pemanfaatan serta perlindungan sumberdaya hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani selaku perusahaan yang memiliki wewenang atas pengelolaan hutan Indonesia bersama masyarakat desa hutan dengan adil sehingga mencapai kepentingan bersama.

Pelaksanaan program PHBM ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh penghasilan tambahan dengan ikut melestarikan dan menjaga hutan produksi (Perum Perhutani, 2001). Berdasarkan UU No.41 tahun 1999 masyarakat sekitar hutan berhak menikmati sumberdaya yang dihasilkan hutan seperti memanfaatkan hutan serta mendapatkan kompensasi karena hilangnya akses hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Program PHBM memberikan kesempatan bagi masyarakat desa hutan untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengelolaan hutan. Peran masyarakat turut membantu dalam pembangunan di bidang kehutanan. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong dan membantu berbagai kegiatan di bidang kehutanan (UU No.41 tahun 1999). Partisipasi masyarakat desa hutan sangat diperlukan agar manfaat ekonomi dan ekologis hutan dapat dinikmati secara berkelanjutan (Hernanto,2007).

Bentuk partisipasi masyarakat desa hutan pada program PHBM dapat terlihat dengan terbentuknya suatu lembaga yang menghimpun seluruh partisipan pada program PHBM. Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH merupakan lembaga masyarakat desa yang memiliki kepedulian dalam pengelolaan sumberdaya hutan (Perum Perhutani, 2009). Kelembagaan LMDH yang dibentuk oleh Perhutani bersama masyarakat yang bertujuan sebagai sarana bekerjasama atau menjalin kemitraan antara masyarakat dengan Perum Perhutani dalam rangka pelestarian alam dan pembangunan hutan (WAC, 2009).

Melalui kelembagaan tersebut masyarakat dan Perum Perhutani merumuskan program-program dan berbagai kesepakatan dengan didasarkan pada inisiatif. Program dan kesepakatan yang telah diprakarsai oleh kedua pihak diharapkan dapat memberikan perubahan yang mengarah pada peningkatan ekonomi masyarakat dan keseimbangan ekologi (Kurniawan, 2011). Agar dapat mewujudkan hal tersebut diperlukan pola relasi yang baik antara lembaga masyarakat desa hutan dan Perum Perhutani sehingga kedua lembaga tersebut dapat menemukan peran-peran yang akuntabel, efektif dan demokratis dalam pengelolaan sumberdaya hutan (Rosyadi, 2014).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosyadi (2014) mengenai relasi kuasa antara Perum Perhutani dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan menunjukkan bahwa LMDH tidak dilibatkan secara signifikan dalam perencanaan program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM). Perum Perhutani masih menjadi aktor dominan dengan kekuasaan besar dalam menentukan pemangku kepentingan mana yang di kehendaki untuk terlibat dalam perencanaan programnya. Akibatnya, LMDH atau anggota masyarakat desa hutan merasa Perum Perhutani tidak lagi menganggap serius peran LMDH dalam proses

pengelolaan program-program PHBM. Perum Perhutani lebih fokus mengejar target keuntungan untuk kepentingan perusahaan tetapi di pihak lain, tidak meningkatkan pembagian peran dengan LMDH sebagai mitra sejajar dalam program PHBM. Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat hal yang tidak sesuai dalam pelaksanaan program PHBM sebagaimana yang telah diatur dalam SK Direksi Perhutani mengenai program PHBM tahun 2009.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat menunjukkan bahwa pentingnya melakukan kajian mengenai sistem pelaksanaan program PHBM. Pengkajian mengenai program PHBM dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program tersebut dan apakah sudah berjalan secara efektif secara umum. Disisi lain, program PHBM memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga sumberdaya hutan. Apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan maka tujuan dari program tersebut tidak akan tercapai. Dengan dilakukannya kajian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan sebagai bahan perbaikan supaya tercapainya maksud dan tujuan dari pelaksanaan program PHBM.

Menyikapi penelitian yang dilakukan oleh Rosyadi (2014), menunjukkan bahwa perlunya dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan program PHBM disetiap daerah. Salah satu hal yang perlu dikaji yaitu pola hubungan antara masyarakat (LMDH) dengan Perum Perhutani selaku aktor dari pelaksanaan program PHBM. Komunikasi yang baik diantara keduanya dalam perencanaan program pengelolaan sumberdaya hutan akan mengarah peningkatan ekonomi masyarakat. Partisipasi masyarakat dan dukungan pihak Perum Perhutani dapat digali dan diberdayakan secara optimal sebagai kekuatan pembangunan suatu daerah dan mewujudkan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (Nugroho, 2011).

Berdasarkan observasi pendahuluan di Kecamatan Ngancar, masyarakat desa yang tinggal disekitar hutan memiliki taraf hidup yang rendah. Hal tersebut diketahui bahwa mereka masih membutuhkan hutan dalam hal pemenuhan kebutuhannya seperti memanfaatkan lahan sekitar hutan untuk bercocok tanam. Sementara itu, mereka juga tidak memiliki kemampuan membeli maupun

menyewa lahan sehingga mereka melakukan hal tersebut. Menyikapi keadaan tersebut, kebijakan program PHBM diberlakukan di daerah tersebut.

Perum Perhutani memberikan hak atas pengelolaan hutan produksi yang ada kepada masyarakat Desa Ngancar sebesar 517 hektar. Berikut adalah Luasan lahan hutan yang diberikan oleh Perum Perhutani.

Tabel 1. Luas Hutan Pangkuan Desa Ngancar pada Tahun 2014-2017

Kawasan Hutan	Luas lahan (ha)
Hutan Produksi	186,2
LDTI (Lapangan Dengan Tujuan Istimewa)	14,9
KPS (Kawasan Perlindungan Setempat)	39,2
Pemukiman	276,7
Total	517

Sumber : LMDH Lancar Jaya, 2017

Tabel 1 menyatakan bahwa luasan hutan untuk tanaman sengon seluas 186,2 hektar. Luasan hutan produksi sengon seluas 186,2 hektar merupakan luasan lahan yang dapat digunakan oleh masyarakat desa hutan dalam melakukan usahatani dibawah pokok tegakan tanaman sengon yang ditanam oleh Perum Perhutani. Kontribusi dari adanya program PHBM berupa pengambilan manfaat dari hasil tanaman tumpangsari yang ditanam bersamaan dengan tanaman utama. Penerapan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) mendorong pihak Perum Perhutani membentuk sistem manajemen dimana masyarakat dapat ikut berperan serta dalam mengelola hutan dan mendapatkan pendapatan dari kegiatan tersebut (Sudarsono, 2016).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Ngancar, mengidentifikasi sistem pelaksanaan program PHBM di Desa Ngancar, mengidentifikasi manfaat ekonomi dilihat dari pendapatan yang diterima pada usahatani di lahan Perum Perhutani pada pola PHBM dan peran *stakeholder* pada pengelolaan PHBM di Desa Ngancar.

1.2. Rumusan Masalah

Desa Ngancar merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngancar yang mayoritas masyarakatnya termasuk ke dalam masyarakat desa hutan yang mengikuti program PHBM. Masyarakat Desa Ngancar yang tergabung dalam program PHBM melakukan usahatani tanaman semusim bersamaan dengan pohon

tegakan sengon yang ditanam oleh Perum Perhutani dengan sistem pola tanam tumpang sari. Masyarakat tersebut mengikuti program PHBM karena mereka tidak memiliki dana untuk membeli lahan dan tidak memiliki kekuasaan untuk mengelola hutan di sekitarnya. Program PHBM memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tinggal disekitar hutan untuk dapat memanfaatkan lahan hutan dengan sistem tanam tumpang sari dengan tanaman sengon.

Masyarakat yang bergantung terhadap sumberdaya hutan menjadi sasaran utama program PHBM karena masyarakat tersebut cenderung akan terus memanfaatkan sumberdaya hutan yang diindikasikan membuat kerusakan terhadap sumberdaya hutan. Supaya menghindari terjadinya hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan pelaksanaan program PHBM di berbagai daerah termasuk Desa Ngancar. Program PHBM dilaksanakan untuk melestarikan sumberdaya hutan juga sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat desa hutan.

Upaya membantu menaikkan perekonomian masyarakat desa hutan, Perum Perhutani memberikan hak kelola lahan dibawah tegakan sebesar 186,2 ha yang harus dibagi rata ke seluruh anggota LMDH. Seiring dengan diadakannya program PHBM di Desa Ngancar diharapkan dapat memberikan penambahan pendapatan kepada petani desa hutan. Selain itu, Perum Perhutani juga melakukan pembagian atau *share* pada hasil panen tanaman tegakan. Sebagai timbal balik dari kegiatan bagi hasil tersebut, masyarakat wajib menjaga keamanan hutan dengan tidak mengganggu tanaman utama yaitu sengon. Kebijakan tersebut telah dibuat oleh pihak Perum Perhutani dalam SK Direksi Perhutani tahun 2009.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dirumuskan hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana sistem pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Ngancar ?
2. Bagaimana pendapatan usahatani di lahan Perum Perhutani dengan pola PHBM di Desa Ngancar ?
3. Bagaimana peran *stakeholder* pada program PHBM di Desa Ngancar ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi sistem pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Ngancar.
2. Menganalisis pendapatan dan kelayakan usahatani di lahan Perum Perhutani pola PHBM di Desa Ngancar Kab. Kediri.
3. Mengidentifikasi peran *stakeholder* pada pengelolaan PHBM di Desa Ngancar

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan evaluasi bagi LMDH Lancar Jaya dan Perum Perhutani mengenai pelaksanaan program PHBM dan sistem *sharing* yang dilakukan.
2. Sebagai bahan acuan bagi Pehutani terhadap pelaksanaan program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM)
3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan pokok bahasan pengelolaan hutan bersama masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai program PHBM pernah dilakukan oleh Ramadhani (2012), penelitiannya memiliki beberapa tujuan penelitian yaitu 1) mendeskripsikan partisipasi petani tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring dalam program PHBM Plus di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, 2) menganalisis dampak program PHBM Plus terhadap pendapatan petani di Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Analisis yang digunakan untuk memenuhi tujuan kedua adalah analisis pendapatan usahatani jagung. Hasil dari analisis pendapatan memiliki perbedaan yang signifikan yaitu terlihat dari pendapatan rata-rata usahatani jagung yang dilakukan oleh petani PHBM lebih besar dibandingkan dengan petani yang kurang berpartisipasi. Dapat dikatakan bahwa program PHBM Plus memiliki dampak terhadap peningkatan pendapatan petani.

Mukminatin (2015) mengemukakan beberapa tujuan penelitian diantaranya 1) mendeskripsikan pelaksanaan program PHBM di wilayah hutan kayu putih di Kabupaten Ponorogo, 2) menganalisis kelayakan usahatani dan faktor yang mempengaruhi pendapatan petani di hutan kayu putih di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa program PHBM dapat meningkatkan pendapatan petani sekitar hutan. Hasil kelayakan usahatani yang dilakukan pada empat komoditas diketahui bahwa nilai R/C ratio yang diperoleh lebih dari 1 sehingga usahatani program PHBM layak untuk dikembangkan.

Sari (2016) melakukan penelitian mengenai implementasi pelaksanaan program PHBM dan menganalisis manfaat ekonomi yang dirasakan oleh Perum Perhutani dan masyarakat yang mengikuti program PHBM. Hasil analisis dari penelitian yaitu adanya masih terdapat kewajiban yang tidak dilakukan seperti kewajiban LMDH untuk membina dan melarang anggotanya mengalihkan lahan garapannya kepada pihak lain. Selain itu, dengan adanya program PHBM memberikan manfaat ekonomi yang diterima oleh petani penggarap tumpang sari padi dan kacang sebesar Rp.21.364/MT sedangkan manfaat ekonomi yang diterima oleh KPH Indramayu dari *sharing* kayu dan *sharing* usahatani sebesar

Rp.285.600.000/thn.

Sukhmawati (2012) melakukan penelitian tentang Implementasi program PHBM di LMDH Wana Tani Makmur terdiri dari kegiatan di dalam kawasan hutan yang terdiri dari kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman pokok kehutanan, tumpangsari, dan keamanan hutan. partisipasi masyarakat dalam program PHBM masih terbatas pada pelaksanaan dan pengalokasian bagi hasil non kayu. Masih belum terdapat kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan dalam pembuatan program kerja dan tidak semua pihak terkait dan berkontribusi, akses informasi sulit dijangkau dan belum bebas diperoleh, belum terdapat kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan kesempatan yang sama bagi anggota untuk memilih dalam pengambilan keputusan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mayrowani *et al.*, (2011) mengenai pengembangan sistem agroforestri terhadap pendapatan petani. Pada penelitian ini melihat manfaat yang diperoleh dari Agroforestri yaitu peningkatan produksi pangan, pendapatan petani, kelestarian fungsi hutan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. program PHBM mampu memberikan kontribusi pendapatan rumah tangga petani sebesar 41,32 persen. Sistem agroforestri merupakan tahapan untuk mengatasi kemiskinan di lingkungan masyarakat desa hutan dalam hal pendapatan maupun produksi pangan.

Penelitian mengenai program PHBM selanjutnya yaitu penelitian dari oleh Rosyadi (2014) mengenai relasi kuasa antara Perum Perhutani dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan menunjukkan bahwa LMDH tidak dilibatkan secara signifikan dalam perencanaan program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM). Perum Perhutani masih menjadi aktor dominan dengan kekuasaan besar dalam menentukan pemangku kepentingan mana yang di kehendaki untuk terlibat dalam perencanaan programnya. Akibatnya, LMDH (masyarakat) merasa Perum Perhutani tidak lagi menganggap serius peran LMDH dalam proses pengelolaan program-program PHBM. Perum Perhutani lebih fokus mengejar target keuntungan untuk kepentingan perusahaan tetapi di pihak lain, tidak meningkatkan pembagian peran dengan LMDH sebagai mitra sejajar dalam program PHBM.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu oleh Ramadhani (2012), Mukminatin (2015) dan Sari (2016), terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan antara terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang program PHBM. Komoditas yang diteliti merupakan tanaman yang di tanam pada lahan Perum Perhutani dengan pola PHBM. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis pendapatan usahatani.

Berdasarkan penelitian Sukhmawati (2012) dan Rosyadi (2014) juga menganalisis mengenai program PHBM namun terdapat perbedaan yaitu adanya variabel tambahan yang dianalisis pada penelitian yang akan dilakukan yaitu menganalisis pendapatan usahatani di lahan Perum Perhutani dengan pola PHBM dilakukan oleh petani. Sedangkan penelitian Mayrowani *et al.*,(2011) memiliki persamaan yaitu menganalisis pendapatan agroforestri pada lahan PHBM.

2.3 Tinjauan Konsep PHBM

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional (SK Perum Perhutani, 2009).

Menurut Soemarno (2004) dasar dari terbentuknya program ini terlihat dari banyaknya masyarakat Indonesia yang bergantung kepada sumberdaya hutan. Kegiatan kehutanan seringkali menimbulkan konflik berkenaan dengan hak atas lahan dan akses pada sumberdaya alam. Hal ini menyebabkan hilangnya akses ekonomi dan sosial budaya sehingga mengarah kepada konflik antara perusahaan umum Perum Perhutani dengan masyarakat. Pertentangan ini terkadang membuat masyarakat protes sehingga menimbulkan kerusakan fisik dan lingkungan dan masyarakat enggan untuk ikut bekerjasama dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah kehutanan mengambil tindakan tegas dengan mengupayakan program PHBM supaya hal-hal tersebut tidak terjadi secara berkelanjutan.

Sasaran yang ingin dicapai dari program ini yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan lingkungan hidup dengan terbentuknya kelompok masyarakat yang peduli terhadap pelestarian lingkungan hutan. Program ini juga dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional dan profesional melalui pembentukan kelompok masyarakat yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) (Soemarno, 2004).

Pengelolaan sumberdaya hutan di Jawa Timur berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan mengarah kepada *forest for people* (hutan untuk kesejahteraan masyarakat). Program PHBM termasuk kedalam salah satu program prioritas pemberdayaan masyarakat di Jawa Timur. Program ini menggunakan kawasan hutan dan telah ditanami tanaman produktif dengan sistem hutan rakyat dan harus berwawasan agribisnis. Upaya dalam penanggulangan dampak kerusakan hutan akibat kebakaran, *uncontrolled logging* melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat (Soemarno, 2004).

Pendekatan pemberdayaan masyarakat secara langsung memberikan kekuatan kepada pihak yang terlibat dalam hutan agar dapat ikut melestarikannya. Seluruh pihak yang terkait dengan penjarahan hutan seperti petani sekitar hutan, aparat hukum, polisi hutan, harus menjadi sasaran pemberdayaan karena hal tersebut sangat diperlukan.

Menurut Soemarno (2004), konsep agroforestri merupakan istilah tentang pengelolaan hutan dengan tetap memperhatikan pengembangan wilayah terutama masyarakat desa. Agroforestri merupakan suatu bentuk usahatani dalam rangka pengelolaan hutan serbaguna yang menyelaraskan antara kepentingan produksi dengan kepentingan pelestarian, berupa perusahaan secara berurutan jenis tanaman pertanian dengan jenis tanaman kehutanan pada satu lahan hutan. Berdasarkan pernyataan tersebut sesuai dengan kegiatan agroforestri yang ada di Dusun Purwodadi yaitu melakukan pemanfaatan lahan antara jenis tanaman pertanian dengan tanaman tegakan yaitu pohon sengon.

Program PHBM bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian hutan. Sasaran dari program PHBM adalah keberhasilan pembangunan hutan dan optimalisasi fungsi-fungsinya, menjadikan pemberdayaan

masyarakat khususnya lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) sebagai sumber solusi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, keberhasilan pembangunan desa hutan menuju masyarakat mandiri yang sadar lingkungan dan memadukan sistem pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani dengan kebijakan pembangunan daerah (SK Direksi Perum Perhutani, 2001). PHBM akan berjalan ketika dikeluarkannya Perjanjian Kerjasama (PKS) oleh Perum Perhutani, yang di tandatangi oleh pihak pertama yaitu Administratur KPH, dan pihak kedua oleh masyarakat sebagai perwakilan LMDH, serta saksi yaitu Pemerintah Desa dan Dinas Kehutanan. Berdasarkan keputusan direksi Perum Perhutani tahun 2009 tentang pedoman PHBM, prinsip dasar PHBM, yaitu:

1. Prinsip keadilan dan demokratis
2. Prinsip keterbukaan dan kebersamaan
3. Prinsip pembelajaran bersama dan saling memahami
4. Prinsip kejelasan hak dan kewajiban
5. Prinsip pemberdayaan ekonomi kerakyatan
6. Prinsip kerjasama kelembagaan
7. Prinsip perencanaan partisipatif
8. Prinsip kesederhanaan sistem dan prosedur
9. Prinsip perusahaan sebagai fasilitator
10. Prinsip kesesuaian pengelolaan dan karakteristik wilayah

Pelaksanaan program PHBM dilaksanakan dengan pemanfaatan lahan atau ruang, pemanfaatan hasil atas pengelolaan sumberdaya hutan serta saling mendukung dan sadar akan tanggung jawab sosial. Pengelolaan hutan dilaksanakan berdasarkan beberapa program yang di kerjasamakan dengan masyarakat desa hutan, yaitu perencanaan, produksi, pemasaran dan industri, keamanan hutan, keuangan dan SDM. Syarat terlaksananya program PHBM dengan baik apabila memenuhi beberapa hal, yaitu :

1. Pemahaman yang utuh terhadap konsep PHBM dan kesiapan pola pikir (*mindset*) pada semua jajaran Perum Perhutani dan jajaran LMDH untuk melaksanakannya.
2. Desa dengan Kawasan Hutan Pangkuan Desanya (KHPD)

3. Pengkajian Desa Secara Partisipatif (PDP) atau metode lain yang bersifat partisipatif.
4. Pertemuan dan pendampingan yang intensif.
5. Kelembagaan masyarakat desa hutan.
6. Aturan-aturan yang bersifat mengikat.
7. Usaha produktif dan atau sharing (bagi hasil).
8. Peran dan kerjasama antar pihak.

2.4 Tinjauan Konsep Usahatani

Menurut Soekartawi (2003), ilmu usahatani merupakan cara yang dilakukan oleh petani untuk memperoleh dan mengelola sumberdaya seperti lahan, tenaga kerja, waktu, modal, dan pengelolaan yang terbatas untuk mencapai tujuannya. Menurut Shinta (2011), usahatani merupakan suatu keadaan dimana seseorang atau sekumpulan orang mengelola unsur-unsur produksi seperti alam, tenaga kerja, modal dan keterampilan untuk menghasilkan sesuatu di lapangan pertanian.

Sedangkan menurut Shinta (2011), ilmu usahatani merupakan ilmu terapan yang membahas atau mempelajari penggunaan sumberdaya secara efisien dan efektif supaya memperoleh hasil yang maksimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ilmu usahatani merupakan suatu ilmu atau keadaan dimana melakukan kegiatan usaha dalam pertanian dengan memperhatikan penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien.

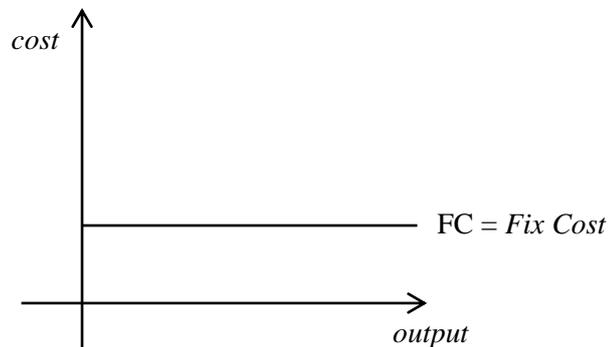
2.4.1 Konsep Analisis Biaya

Konsep analisis biaya mengenai pengaturan harga dari biaya produksi yang dikeluarkan dalam melakukan kegiatan produksi, karena petani tidak dapat menguasai pengaturan harga komoditi yang dijualnya atau memberikan nilai pada komoditi tersebut.

a. Biaya Tetap

Menurut Soekartawi (2003), biaya produksi digolongkan berdasarkan sifatnya. Biaya tetap (*fix cost*), merupakan yang tidak ada hubungannya dengan besaran produksi. Berapapun jumlah output yang akan dihasilkan tidak akan mempengaruhi biaya tersebut. Sedangkan menurut Sukirno (2004), biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak dapat berubah. Faktor produksi yang termasuk

ke dalam biaya tetap yaitu sewa lahan, dan alat pertanian. Kurva biaya tetap dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut :

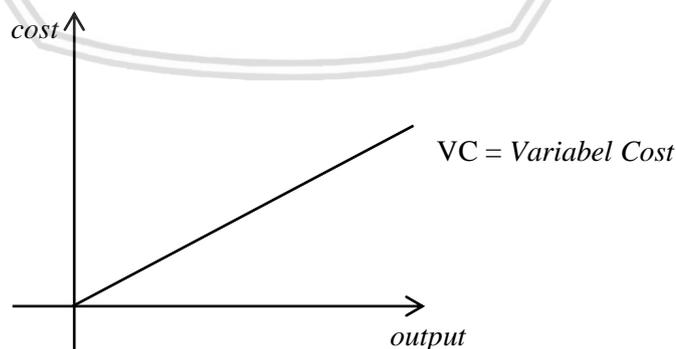


Gambar 1. Kurva *Fix Cost*

Kurva biaya tetap diatas menunjukkan bahwa besarnya biaya yang dikeluarkan tidak mempengaruhi banyaknya output yang akan dihasilkan dengan kata lain seberapa banyak output yang akan dihasilkan maka perusahaan akan mengeluarkan biaya yang sama.

b. Biaya variabel

Biaya tidak tetap (*variabel cost*) merupakan biaya yang berubah apabila skala usahanya berubah. Prinsip biaya tetap dan tidak tetap dapat diterapkan dalam usahatani. Semakin besar jumlah output yang akan dihasilkan maka biaya yang dikeluarkan pun akan semakin besar. Oleh karena itu, biaya yang di kategorikan sebagai biaya variabel yaitu biaya benih, tenaga kerja dan biaya lainnya. Kurva biaya tidak tetap dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut :



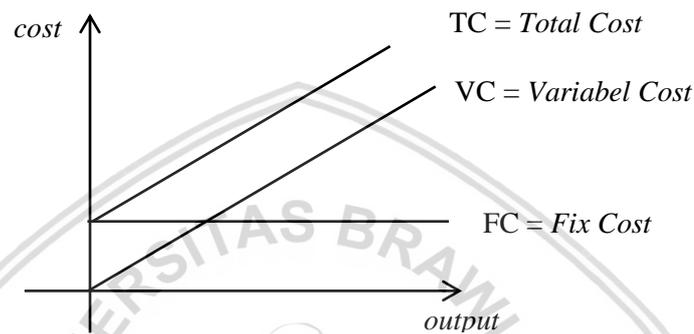
Gambar 2. Kurva *Variabel Cost*

Kurva biaya tidak tetap menunjukkan bahwa jumlah unit yang akan dihasilkan akan mempengaruhi besarnya biaya yang akan dikeluarkan. Terdapat

hubungan positif, dimana setiap penambahan jumlah unit produksi akan menambah biaya produksi yang harus dikeluarkan.

c. Biaya Total (TC)

Menurut Soekartawi (2003), Biaya total (*Total cost*) merupakan kalkulasi antara biaya variabel dan biaya tetap sehingga memperoleh total biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam melakukan proses produksi. Kurva biaya total dapat dilihat pada Gambar 3 sebagai berikut.



Gambar 3. Kurva *Total Cost*

2.4.2 Penerimaan

Menurut Soekartawi (2003), penerimaan usahatani merupakan nilai produk total usahatani dalam jangka waktu tertentu berupa produk yang dijual maupun tidak dijual. Semua komponen produk yang tidak dijual harus dinilai berdasarkan harga pasar. Penerimaan diperoleh dari banyaknya jumlah komoditi yang di produksi dikalikan dengan harga jual komoditi tersebut sesuai dengan ketentuan harga pasar. Penerimaan usahatani dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$TR = Y_i \cdot P_{yi}$$

Keterangan :

- TR = Total penerimaan
- Y_i = Hasil produksi
- P_{yi} = Harga jual dari hasil produksi

2.4.3 Pendapatan

Menurut Soekartawi (2003), Pendapatan merupakan pendapatan dikurangi biaya total produksi yang dikeluarkan. Pendapatan usahatani diperoleh dari harga dikalikan produk yang dijual. Biaya total adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi *Output* Y dengan mengeluarkan biaya untuk

jumlah *Input X* dikalikan harga input. Pendapatan selisih usahatani untuk mengukur imbalan yang diperoleh ditingkat keluarga petani. Pendapatan petani dikatakan lebih besar apabila dilakukan secara efisien dalam penggunaan faktor produksi yang minimal untuk menghasilkan produksi yang maksimal. Berikut adalah rumus dalam melakukan perhitungan keuntungan usahatani.

$$\Pi = TR - TC$$

Keterangan :

Π = Pendapatan Usahatani
 TR = Total Penerimaan (Rp)
 TC = Total Biaya (Rp)

2.4.4 Kelayakan Usahatani

Melakukan analisis kelayakan usahatani dapat dilakukan dengan beberapa alat analisis. Alat analisis yang digunakan yaitu RC ratio, dan analisis BEP. Menurut Soekartawi (2003) Analisis RC rasio (*Return Cost Ratio*) merupakan perbandingan antara penerimaan dan biaya produksi. Analisis tersebut akan menunjukkan tingkat efisiensi ekonomi dari usahatani yang dilakukan. Rumus perhitungan analisis kelayakan usahatani yaitu:

$$R/C \text{ ratio} = \frac{TR}{TC}$$

Keterangan :

RC ratio = Tingkat efisiensi usahatani
 TR = Penerimaan usahatani (Rp)
 TC = Biaya Produksi (Rp)

Efisiensi suatu kegiatan usahatani yang dilakukan dapat diketahui dari analisis kelayakan usahatani tanaman tersebut. Suatu usahatani dikatakan menguntungkan apabila nilai RC rasio > 1 .

2.5. Analisis Stakeholder

Menurut Mahadi (2013) mendefinisikan *stakeholder* merupakan individu maupun kelompok yang mampu mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan, dan memiliki hubungan yang saling berkorelasi. Peran *stakeholder* seringkali menentukan bagaimana sebuah perusahaan di masa depan.

Analisis *Stakeholder* sebagai suatu pendekatan dan prosedur untuk mencapai pemahaman suatu sistem dengan cara mengidentifikasi aktor-aktor

kunci di dalam sistem, menilai kepentingan masing-masing di dalam sisten tersebut. Grimble dan Chan (1995) dalam Sari (2016) menambahkan *stakeholder* sendiri dimaksudkan semua yang mempengaruhi, dan atau dipengaruhi oleh, kebijakan, keputusan, dan tindakan sistem tersebut. Hal ini dapat bersifat individu, masyarakat, kelompok sosial atau institusi dalam berbagai ukuran, kesatuan atau tingkat dalam masyarakat. Para *stakeholder* pada pengelolaan PHBM berperan dalam perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi, dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses memanfaatkan lahan juga tetap menjaga keberadaan hutan.

Berdasarkan aktornya, PHBM dapat digolongkan sebagai usaha bersama, kerjasama, yakni antara Perum Perhutani dengan masyarakat atau kelompok tani hutan. Masing-masing *stakeholder* memiliki peran, tanggung jawab, bidang kegiatannya sendiri-sendiri, yang dalam prosesnya akan bekerjasama menghasilkan produk-produk hutan. Kegiatan merumuskan strategi perusahaan, manajemen harus memahami siapa saja pihak-pihak yang berkepentingan terhadap mereka. Hal tersebut akan berguna untuk menetapkan strategi yang tepat dan terarah di masa depan. Atas dasar tersebut, *stakeholder mapping* dapat menjadi perangkat yang menolong manajemen untuk menganalisis *stakeholder* kunci perusahaan. Setiap *stakeholder* memiliki karakteristik tersendiri sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda, termasuk pula strategi yang unik bagi masing-masing *stakeholder*.

Menurut Chevalier (2001) dalam Sari (2016) analisis *stakeholder* dapat dianalisis melalui beberapa tahapan berikut:

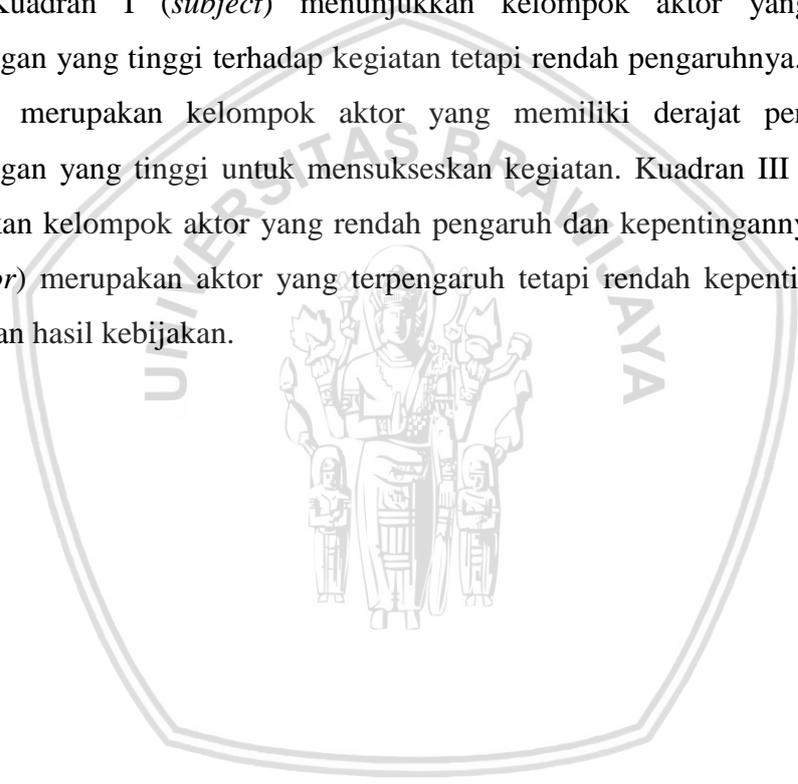
1. Membuat tabel *stakeholder*
2. Mengidentifikasi dan pemetaan aktor berdasarkan kekuatan dan pengaruh dari aktor lain. Kekuatan *stakeholder* mengacu pada kuantitas sumberdaya yang dimiliki *stakeholder*, yaitu sumberdaya manusia (SDM), finansial, dan politik. Pengaruh dari masing-masing *stakeholder* mengacu pada tingkat pengaruhnya dalam proses penyusunan kebijakan.
3. Melakukan pemetaan aktor grid untuk mengetahui tingkat kepentingan dan pengaruh pada masing-masing *stakeholder* serta posisi *stakeholder* masuk kategori *Subject*, *Players*, *Bystander*, atau *Actor*.

Pengaruh	I <i>Subject</i>	II <i>Players</i>
	III <i>Bystander</i>	IV <i>Actor</i>
Kepentingan		

Sumber: Chevalier (2001) dalam Sari (2016)

Gambar 4. Tingkat kepentingan dan pengaruh *stakeholder* PHBM

Kuadran I (*subject*) menunjukkan kelompok aktor yang memiliki kepentingan yang tinggi terhadap kegiatan tetapi rendah pengaruhnya. Kuadran II (*Player*) merupakan kelompok aktor yang memiliki derajat pengaruh dan kepentingan yang tinggi untuk mensukseskan kegiatan. Kuadran III (*Bystander*) merupakan kelompok aktor yang rendah pengaruh dan kepentingannya. Kuadran IV (*actor*) merupakan aktor yang terpengaruh tetapi rendah kepentingan dalam tujuan dan hasil kebijakan.



III. KERANGKA PEMIKIRAN

3.1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Keberadaan hutan memberikan berbagai macam manfaat bagi seluruh makhluk hidup yang ada. Sumberdaya yang terdapat di hutan memberikan manfaat dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan maupun papan masyarakat disekitarnya. Selain itu, keberadaan hutan memberikan manfaat dari aspek ekonomi maupun ekologi. Manfaat tersebut terkadang tidak digunakan dengan baik oleh beberapa pihak tanpa melihat kelestarian dari sumberdaya hutan tersebut. Pengetahuan yang kurang dan informasi dalam mengakses hutan sehingga membuat masyarakat khususnya disekitar hutan memicu terjadinya kerusakan hutan. Supaya hal tersebut tidak terus terjadi, Perum Perhutani menggagas sebuah program pemberdayaan masyarakat berbasis pengelolaan hutan bersama masyarakat sekitar hutan sehingga mereka memiliki partisipasi dalam menjaga dan melestarikan hutan milik negara.

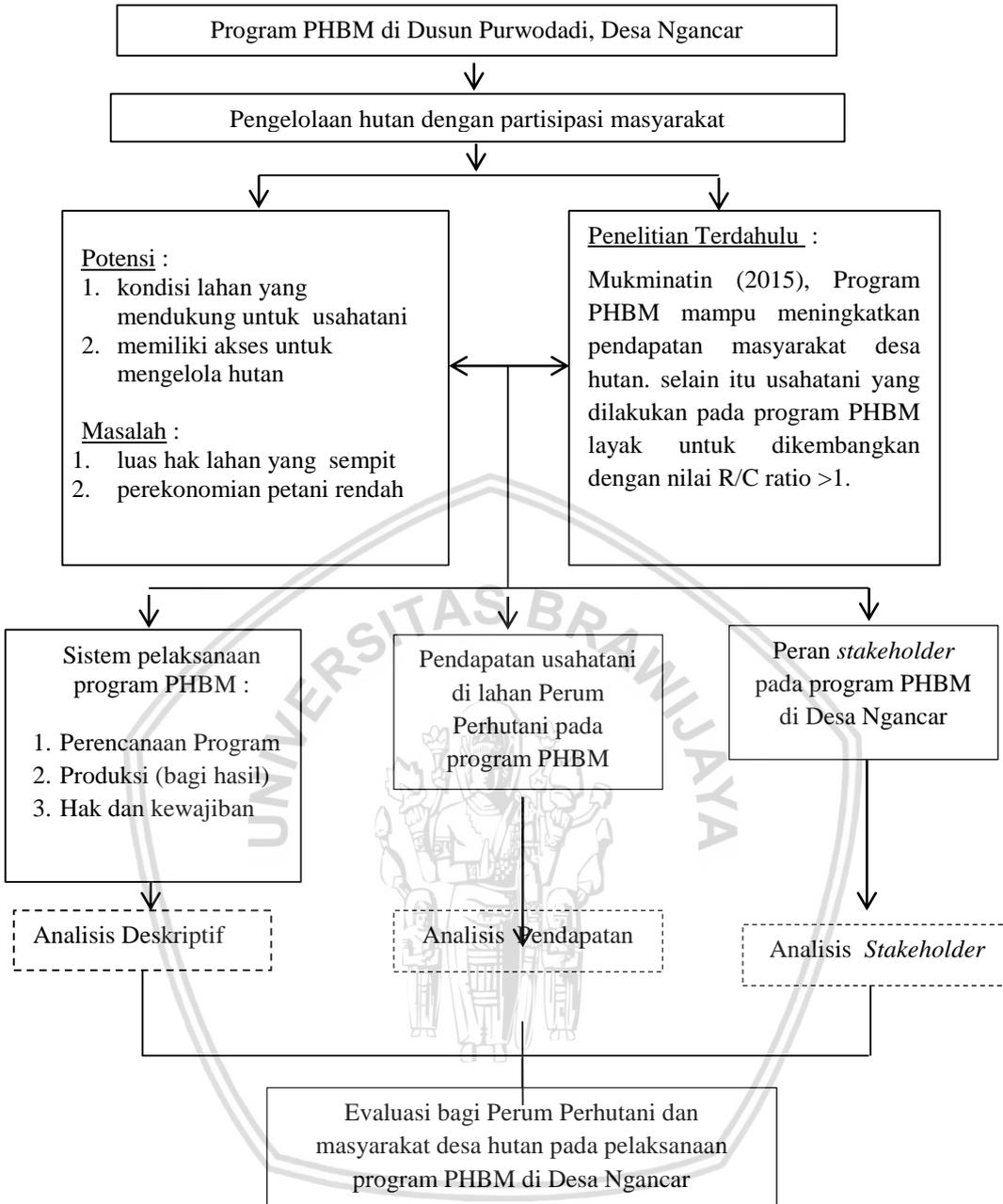
Program PHBM memiliki tujuan yaitu untuk memberikan kesempatan pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi dan sosial secara proporsional dan profesional. dilihat dari pola hubungan sosial antara masyarakat (LMDH) dan Perum Perhutani dalam hal menjalankan program PHBM. Hubungan sosial yang terjalin antara masyarakat (LMDH) dengan Perum Perhutani akan membangun komunikasi yang baik dalam perencanaan program pengelolaan sumberdaya hutan yang mengarah peningkatan ekonomi masyarakat.

Perum Perhutani selaku pengelola hutan produksi di Pulau Jawa mengeluarkan SK Direksi Perhutani No.682 tahun 2009 Keputusan tersebut tentang pedoman mekanisme pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Pada pedoman tersebut telah diatur berbagai hal mengenai pelaksanaan program PHBM. Pedoman tersebut bersifat umum sehingga untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, pihak Perum Perhutani dan masyarakat membuat perjanjian kerjasama yang disepakati bersama masyarakat yang mengikuti program PHBM. Kesepakatan tersebut berisi hak dan kewajiban yang harus di penuhi dan dilaksanakan oleh keduanya.

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap program ini menjadi salah satu indikator keberhasilan dari program ini. Pelaksanaan program PHBM tidak terlepas dari adanya peran dari *stakeholder* dalam mencapai tujuan atas kesepakatan bersama. Sehingga perlu untuk menganalisis peran *stakeholder* dalam melakukan manajerial program di Desa Ngancar.

Kondisi wilayah Desa Ngancar memiliki potensi dalam pengembangan berbagai kegiatan usahatani. Namun, rendahnya perekonomian masyarakat khususnya masyarakat desa hutan yang masih bergantung pada sumberdaya hutan di sekitarnya menjadi permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Permasalahan tersebut menjadi fokus Perum Perhutani dalam pelaksanaan program PHBM. Pelaksanaan program PHBM dilaksanakan di Desa Ngancar, diketahui bahwa luas hak kelola lahan yang telah dibagi oleh Perum Perhutani kepada masyarakat sebesar 0,1 ha. Luasan lahan tersebut termasuk kedalam kategori lahan sempit bagi kegiatan usahatani. Luas lahan menjadi salah satu faktor dari tingkat pendapatan usahatani yang akan diperoleh. Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh petani.

Pada penelitian ini program PHBM diharapkan mampu menambah pendapatan bagi petani sekaligus memberikan keuntungan bagi pihak Perum Perhutani. Besarnya pendapatan yang diterima oleh petani dalam usahatani dengan sistem tumpang sari dengan tanaman sengon dianalisis menggunakan analisis biaya produksi, penerimaan, dan pendapatan. Hasil analisis pendapatan usahatani nanas di kawasan hutan sengon Desa Ngancar akan menunjukkan besaran pendapatan yang diterima oleh masyarakat desa hutan terhadap kegiatan usahatani di lahan Perum Perhutani dengan pola PHBM. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu mengidentifikasi pelaksanaan program berdasarkan peran *stakeholder* pada program PHBM dengan menggunakan tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh pada suatu program. Adapun gambaran umum mengenai kerangka pemikiran dari penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 5.



-----> = Alat Analisis
 —————> = Alur Pemikiran

Gambar 5. Kerangka Pemikiran Evaluasi Ekonomi pada Program PHBM di Dusun Purwodadi, Desa Ngancar, Kabupaten Kediri

3.2. Hipotesis

Berdasarkan uraian serta bagan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya dapat disusun hipotesis yaitu diduga usahatani komoditas nanas, jagung, tomat dan cabai di lahan Perum Perhutani pada program PHBM layak dengan R/C rasio > 1 .

3.3. Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian dibatasi dengan batasan masalah supaya menghindari kesalahpahaman persepsi dari hasil penelitian sehingga mendapatkan pemahaman yang sama. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Sistem pelaksanaan dalam program PHBM pada penelitian ini membahas mengenai perencanaan program, sistem pembagian hasil serta hak dan kewajiban antara pihak Perum Perhutani dengan LMDH Lancar Jaya.
2. Usahatani yang dianalisis menggunakan waktu tanam dalam satu tahun.

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Adapun pengukuran variabel dianalisa dalam penelitian ini yaitu :

1. Evaluasi ekonomi adalah menganalisis penerimaan yang diterima oleh masyarakat terhadap program PHBM dalam hal pendapatan usahatani yang mereka lakukan pada lahan bantuan Perum Perhutani.
2. Analisis pendapatan usahatani di lahan Perum Perhutani dengan pola PHBM merupakan pendapatan yang diterima oleh masyarakat desa hutan yang melaksanakan usahatani di lahan Perum Perhutani pada program PHBM. (Rp/Ha/MT)
3. Biaya merupakan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh petani yang melakukan budidaya tanaman semusim dan tahunan. (Rp/MT)
4. Penerimaan diperoleh dari perkalian antara banyaknya hasil panen tanaman dengan harga jual yang berlaku setiap kali musim panen. (Rp/MT)
5. Analisis *stakeholder* merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh *stakeholder*.
6. Tingkat kepentingan *stakeholder* diukur dengan variabel :
 - a. K1 : Keterlibatan *stakeholder* dalam kegiatan PHBM
 - b. K2 : Manfaat kegiatan PHBM bagi *stakeholder*

- c. K3 : Kewenangan *stakeholder* dalam PHBM
- d. K4 : Curahan waktu *stakeholder* dalam PHBM
- e. K5 : Tingkat ketergantungan *stakeholder* dalam PHBM

Tingkat kepentingan aktor dapat dilihat dengan melakukan pengkodean dengan menggunakan skala likert yaitu,

Skor	Kriteria	Keterangan
5	Sangat tinggi	Sangat bergantung pada keberadaan PHBM di Desa Ngancar
4	Tinggi	Ketergantungan yang tinggi terhadap keberadaan PHBM di Desa Ngancar.
3	Cukup tinggi	Cukup bergantung terhadap keberadaan PHBM di Desa Ngancar
2	Kurang tinggi	Ketergantungan pada keberadaan PHBM di Desa Ngancar
1	Rendah	Tidak terdapat ketergantungan pada keberadaan PHBM di Desa Ngancar.

7. Tingkat pengaruh *stakeholder* diukur dengan variabel :

- a. P1 : Peran dan partisipasi stakeholder dalam PHBM.
- b. P2 : Kekuatan stakeholder dalam interaksi terkait PHBM.
- c. P3 : Kontrol dan pengawasan stakeholder dalam PHBM.
- d. P4 : Kekuatan pribadi stakeholder PHBM.
- e. P5 : Kapasitas sumberdaya yang disediakan stakeholder PHBM.

Pengaruh dari masing-masing *stakeholder* mengacu pada tingkat pengaruhnya dalam proses penyusunan kebijakan. Penilaian tingkat pengaruh menggunakan skala *likert* yaitu,

Skor	Kriteria	Keterangan
5	Sangat tinggi	Jika respon aktor berpengaruh nyata terhadap aktivitas aktor lain.
4	Tinggi	Jika respon aktor berpengaruh besar terhadap aktivitas aktor lain.
3	Cukup tinggi	Jika respon aktor tersebut cukup berpengaruh terhadap aktivitas aktor lain
2	Kurang tinggi	Jika respon aktor tersebut kurang berpengaruh terhadap aktivitas aktor lain
1	Rendah	Jika respon aktor tersebut tidak berpengaruh terhadap aktivitas aktor lain

IV. METODE PENELITIAN

4.1. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Purwodadi, Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Lokasi penelitian dipilih secara *purposive* dengan pertimbangan bahwa Dusun Purwodadi merupakan dusun dengan mayoritas petani mengikuti program PHBM. Petani yang mengikuti program PHBM pada penelitian ini melakukan kegiatan usahatani nanas, jagung, tomat dan cabai. Hal tersebut sejalan dalam memperoleh tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui sistem pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Lokasi ini dipilih karena memiliki struktur organisasi atau instansi lembaga yang berperan aktif dalam sistematisasi administrasi petani desa hutan yang mengikuti program tersebut sehingga memudahkan bagi peneliti untuk mendapatkan informasi secara detail dan akurat. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar dipilihnya daerah ini sebagai lokasi penelitian. Waktu penelitian dimulai pada bulan Mei - Juni 2018.

4.2. Metode Penarikan Sampel dan Penentuan Responden

Penelitian ini menggunakan dua jenis responden yaitu petani sampel dan *key informan*. Kedua jenis responden merupakan individu yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan program PHBM. Pengambilan sampel petani menggunakan *purposive random sampling* yang berarti pemilihan responden dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sampel terhadap sekelompok subjek didasarkan atas kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian (Margono, 2004).

Total populasi yang mengikuti program PHBM di Dusun Purwodadi sebanyak 450 petani yang melakukan budidaya tanaman dengan sistem tumpang sari dengan tanaman sengon dan juga aktif mengikuti program PHBM dengan menjadi anggota LMDH Lancar Jaya di Dusun Purwodadi, Desa Ngancar Kabupaten Kediri. Oleh karena itu, penentuan banyaknya sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin yang ditulis oleh Umar (2001) yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan :

n : Ukuran sampel

N : Ukuran populasi

e : Presentase toleransi kesalahan sebesar 15 % atau 0.15

Berdasarkan rumus tersebut, maka perhitungan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

$$n = \frac{450}{1 + 450 (0.15)^2}$$

$$n = 40 \text{ sampel}$$

Presentase tingkat kesalahan sebesar 15% dengan pertimbangan presentase tersebut mewakili dari tingkat kesalahan dari keseluruhan jumlah populasi di lokasi penelitian. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah sampel yang diteliti sebanyak 40 petani yang mengikuti program PHBM. Penentuan sampel dilakukan secara *purposive* berdasarkan informasi *key informan*.

Data primer juga didapatkan dari beberapa *key informan* menggunakan metode *purposive sampling* yang berarti pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini, *key informan* yang dibutuhkan merupakan individu yang memahami mengenai program PHBM dan mengetahui proses pelaksanaannya. Informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah ketua LMDH Lancar Jaya, Pihak Perum Perhutani, Dinas Kehutanan dan Kepala Desa Ngancar.

4.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan selama penelitian menggunakan beberapa metode sesuai dengan jenis data yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian. Adapun jenis data yang diperlukan beserta metodenya yaitu :

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber atau responden. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu observasi non partisipan atau pengamatan secara langsung di daerah penelitian. Kegiatan observasi non

partisipasi dilakukan untuk mengetahui dan melihat kegiatan sehari-hari sebagai data pendukung dari hasil data primer yang diperoleh dari responden. Selanjutnya menggunakan metode wawancara dengan menggunakan bantuan kuisioner. Data yang diambil meliputi karakteristik responden, penggunaan faktor produksi, penggunaan biaya dalam usahatani di lahan Perum Perhutani, pelaksanaan program PHBM yang telah dilaksanakan di lokasi penelitian serta peran *stakeholder* atas program PHBM di Desa Ngancar.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung untuk melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh dari perpustakaan, penelitian terdahulu, serta instansi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini seperti berbagai literatur yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Dinas Pertanian Kabupaten Kediri, Kantor Desa Ngancar, Perum Perhutani Kediri dan LMDH Lancar Jaya. Data sekunder yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu profil Kecamatan Ngancar, data jumlah petani sebagai anggota LMDH Lancar Jaya, data mengenai pelaksanaan program PHBM serta data-data lainnya yang digunakan sebagai pendukung dari penelitian ini.

4.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis data deskriptif dan kuantitatif. Data dan informasi yang diperoleh, disusun dalam bentuk tabulasi data agar mempermudah dalam melakukan analisis.

4.4.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan mengenai karakteristik keadaan yang ada di lapangan serta deskripsi mengenai sistem pelaksanaan program PHBM di Desa Ngancar. Pelaksanaan program PHBM yang dianalisis berdasarkan pelaksanaan program PHBM meliputi bidang perencanaan, bidang pembinaan sumberdaya hutan, bidang produksi, bidang keamanan hutan, bidang keuangan dan bidang SDM seperti yang terdapat pada SK Direksi Perum Perhutani tahun 2009. Pencarian informasi dengan melakukan wawancara pada *key informan* selaku informan kunci. Penggunaan metode analisis ini untuk

menggambarkan, menguraikan dan menyimpulkan tujuan penelitian secara deskriptif.

4.4.2 Analisis Usahatani

Analisis usahatani dilakukan untuk mengetahui pendapatan yang diterima oleh masyarakat desa hutan dalam melakukan usahatani di lahan Perum Perhutani dengan sistem tumpangsari dengan tanaman sengon. Usahatani yang dilakukan oleh masyarakat di lahan Perum Perhutani yaitu nanas, jagung, cabai dan tomat. Analisis ini memberikan gambaran mengenai besarnya biaya yang dikeluarkan serta pendapatan yang diterima dari usahatani dengan sistem tumpangsari dengan sengon. Apabila akan mendapatkan besarnya biaya serta pendapatan usahatani, maka perlu menghitung selama proses produksi berlangsung, yaitu :

1. Biaya Usahatani

Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh petani yang melakukan budidaya tanaman tahunan dibagi menjadi dua yaitu biaya investasi dan biaya operasional dan pemeliharaan. Pada penelitian ini, biaya investasi yang digunakan diperoleh dari biaya investasi dibagi selama umur ekonomis tanaman yang diperoleh dari biaya penyusutan atau depresiasi peralatan. Sedangkan biaya operasi dan pemeliharaan diperoleh dari biaya pemupukan, pemeliharaan dan pemanenan. Periode dalam perhitungan biaya usahatani nanas pada penelitian ini yaitu pada tahun panen terakhir yaitu tahun 2016 - 2017. Total biaya yang dikeluarkan petani pertahun merupakan penjumlahan dari biaya investasi dan biaya pemeliharaan. Bagi tanaman semusim, perhitungan biaya usahatani dihitung pada satu musim tanam. Perhitungan biaya seluruh komoditas di konversi menjadi biaya satu tahun mengikuti biaya tanaman tahunan.

2. Penerimaan Usahatani

Penerimaan diperoleh dari perkalian antara banyaknya hasil panen tanaman dengan harga jual yang berlaku setiap kali musim panen. Penerimaan tanaman tahunan pada penelitian ini dihitung berdasarkan umur panen terakhir. Harga ditentukan berdasarkan harga jual rata-rata yang diterima petani. Bagi tanaman tahunan, harga maupun produksi untuk setiap tahunnya diasumsikan sama dan tidak berlaku inflasi, oleh karena itu perhitungan biaya dan penerimaan nanas diberlakukan harga yang sama dan konstan. Perhitungan penerimaan

seluruh komoditas di konversi menjadi biaya satu tahun mengikuti penerimaan tanaman tahunan. Rumus perhitungan penerimaan sebagai berikut.

$$TR_t = Y_t \cdot P_t$$

Keterangan :

TR_t = Penerimaan (Rp/th)

Y_t = Produksi yang diperoleh petani

P_t = Harga jual hasil panen

3. Pendapatan Usahatani

Pendapatan merupakan total keuntungan yang diperoleh dari hasil pengurangan antara penerimaan dengan biaya yang telah dikeluarkan. Pendapatan usahatani nanas pada penelitian ini menggunakan pengurangan biaya produksi yang dikeluarkan petani pada tahun terakhir buah berproduksi. Biaya tersebut meliputi biaya perawatan, pemupukan, panen dan pasca panen, dan biaya penyusutan alat yang digunakan dalam melakukan perawatan. Bagi tanaman semusim dihitung pendapatan dalam satu musim tanam. Penerimaan yang diperoleh meliputi penerimaan terhadap total produksi yang diperoleh pada tahun terakhir buah berproduksi. Perhitungan pendapatan seluruh komoditas di konversi menjadi pendapatan satu tahun mengikuti biaya tanaman tahunan. Rumus analisis pendapatan sebagai berikut:

$$\Pi = TR - TC$$

Keterangan :

Π = Pendapatan (Rp/th)

TR = Penerimaan usahatani (Rp)

TC = Biaya produksi (Rp)

4. Kelayakan Usahatani

Kelayakan Usahatani digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi suatu kegiatan usahatani. Pada penelitian ini menggunakan analisis RC rasio karena peneliti menganalisis tingkat biaya dan penerimaan dalam tahun terakhir produksi. Analisis RC Ratio (*Return Cost Ratio*) merupakan perbandingan antara penerimaan dan biaya produksi. Analisis tersebut akan menunjukkan tingkat efisiensi ekonomi dari usahatani yang dilakukan. Rumus perhitungan analisis kelayakan usahatani yaitu :

$$R/C \text{ ratio} = \frac{TR}{TC}$$

Keterangan :

RC ratio = Tingkat efisiensi usahatani
 TR = Penerimaan usahatani (Rp)
 TC = Biaya Produksi (Rp)

Efisiensi suatu kegiatan usahatani yang dilakukan dapat diketahui dari analisis kelayakan usahatani tanaman tersebut. Suatu usahatani dikatakan menguntungkan apabila nilai RC rasio > 1 .

4.4.3 Analisis *Stakeholder*

Stakeholder pada pengelolaan PHBM ini merupakan orang/lembaga/organisasi yang berperan pada pengelolaan PHBM. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui siapa yang terlibat pada pengelolaan, bagaimana peran serta pelaksanaan tugas dari setiap *stakeholder*. Setiap *stakeholder* berperan penting dalam merumuskan suatu kebijakan, namun setiap *stakeholder* memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang berbeda.

Analisis *stakeholder* menggunakan matriks berdasarkan kepentingan dan pengaruh. Kepentingan masing-masing *stakeholder* dapat dilihat dari tupoksi masing-masing *stakeholder*. Pengaruh adalah kekuasaan untuk mempengaruhi peraturan yang berlaku maupun kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan PHBM di Desa Ngancar. Pemetaan *actor grid* untuk mengetahui tingkat kepentingan dan pengaruh pada masing-masing *stakeholder* serta posisi *stakeholder* masuk kategori *Subject, Players, Bystander*, atau *Actor*.

Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi *stakeholder* beserta pengaruh dan kepentingannya dalam pengelolaan PHBM di Desa Ngancar. *Stakeholder* yang dipilih dilihat dari keterlibatannya di dalam pengelolaan PHBM di Desa Ngancar. Hal ini dilakukan untuk melihat pihak-pihak apa saja yang memiliki peranan di dalam mengelola PHBM di Desa Ngancar. *Stakeholder* dalam penelitian ini terdiri dari *key person*, yaitu KPH Kediri, Dinas Kehutanan UPT Pengelolaan Hutan Wilayah IV Kediri, LMDH Lancar Jaya, dan Pemerintah Desa. Pemilihan responden *key informan* berdasarkan pada informasi yang dimiliki oleh instansi terkait terhadap pengelolaan PHBM di Desa Ngancar.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Gambaran Umum

5.1.1 Kesatuan Pangkuan Hutan (KPH) Kediri

Kesatuan Pangkuan Hutan Kediri merupakan salah satu bagian unit wilayah pengelolaan hutan di Divisi Regional Jawa Timur. Letak Geografis KPH Kediri berada pada 111⁰23'58''BT s.d. 111⁰39'44''BT dan 06⁰57'00''LS s.d. 07⁰10'45''LS. Berdasarkan hasil evaluasi potensi sumber daya hutan tahun 2016, fungsi kawasan hutan KPH Kediri terbagi menjadi tiga fungsi yaitu hutan produksi seluas 73.298,2 hektar, hutan lindung 37.884,6 hektar dan BUP seluas 6.149,3 hektar. Kelas perusahaan untuk KPH Kediri yaitu Pokok Pinus seluas 88.744,3 hektar atau 76 persen, Pokok Sengon seluas 9.990,9 hektar atau 9 persen dan Pokok Jati seluas 18.596,9 atau 16 persen.

Kesatuan Pangkuan Hutan Kediri mengorganisasikan 9 BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan), 43 RPH (Resort Pemangkuan Hutan) dengan total luas hutan keseluruhan seluas 117.332,1 hektar. Bagian Resort Pemangkuan Hutan mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PHBM dilapangan untuk kegiatan tanaman, pemeliharaan, keamanan dan tebangan pokok. KPH Kediri memiliki 558 karyawan hingga tahun 2018. Kesembilan BKPH meliputi Pace, Kediri, Tulungagung, Pare, Trenggalek, Dongko, Kampak, Karanganyar dan Badung. Berikut adalah luasan wilayah kerja BKPH di KPH Kediri.

Tabel 2. Luasan BKPH pada KPH Kediri

No	Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH)	Luas (Ha)
1	BKPH Pace	11.602,9
2	BKPH Kediri	12.648,9
3	BKPH Tulungagung	14.366,6
4	BKPH Pare	9.983,0
5	BKPH Trenggalek	12.474,2
6	BKPH Dongko	14.719,0
7	BKPH Kampak	15.123,8
8	BKPH Karanganyar	9.942,3
9	BKPH Badung	16.454,3
Jumlah		117.332,1

Sumber : KPH Kediri (2018)

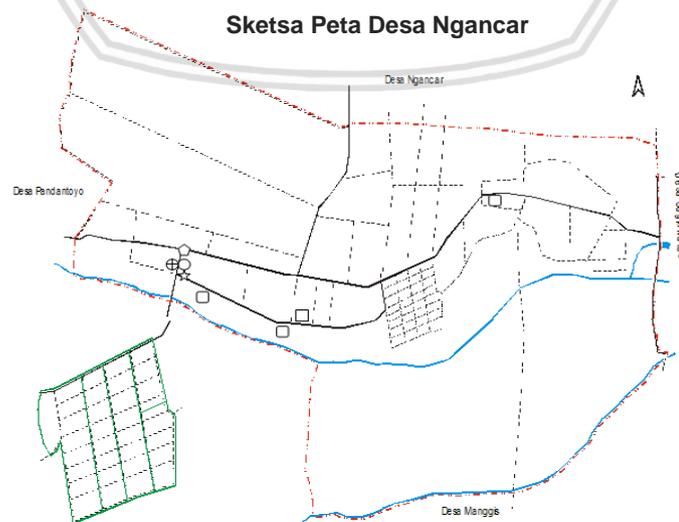
5.1.2 Demografi Desa Ngancar

Desa Ngancar merupakan desa yang menjadi lokasi penelitian mengenai PHBM. Desa ini merupakan salah satu desa pangkuan hutan pada program PHBM di KPH Kediri. Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang menaungi masyarakat desa hutan yang ada di Desa Ngancar yaitu LMDH Lancar Jaya. Secara administratif, Desa Ngancar terletak di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur dengan luas 720 hektar dengan luas wilayah hutan pangkuan desa (HPD) seluas 517 hektar.

Desa Ngancar termasuk sebagai Desa Magersaren. Desa Magersaren adalah pemukiman atau tanah yang menguasai lahan hutan sebelum Perhutani didirikan di Jawa. Dalam hal ini, tanah yang masuk dalam kawasan hutan merupakan tanah pinjaman dari perhutani kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak berhak mengubah lahan menjadi lahan milik pribadi. Hal ini dibuktikan dengan luasan desa yang 72 persen merupakan lahan Perhutani yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Ngancar.

Desa Ngancar memiliki 4 dusun yaitu Dusun Purwodadi, Dusun Ngancar, Dusun Panceran dan Dusun Puhrejo. Batasan wilayah Desa Ngancar yaitu sebagai berikut:

Sebelah utara	: Desa Babadan, Kecamatan Ngancar
Sebelah selatan	: Desa Manggis, Kecamatan Ngancar
Sebelah timur	: Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar
Sebelah barat	: Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar



Gambar 6. Peta Desa Ngancar

Desa Ngancar berada pada ketinggian 555 mdpl, dengan suhu rata-rata harian 27 derajat *celcius*. Desa Ngancar tidak memiliki lahan sawah melainkan menggunakan lahan tegalan seluas 92,40 hektar untuk melakukan kegiatan usahatani. Pemenuhan kebutuhan air pada lahan pertanian menggunakan air tadah hujan sehingga masyarakat melakukan usahatani pada bulan awal musim hujan, namun apabila lahan tegalan, masyarakat membeli air untuk memenuhi kebutuhan air di lahan.

Desa Ngancar memiliki jumlah penduduk sebanyak 4823 jiwa yang terdiri dari 1372 kepala keluarga (KK). Karakteristik penduduk Desa Ngancar dapat dilihat dari jenis kelamin, dan mata pencaharian. Data karakteristik penduduk di Desa Ngancar tersaji dalam Tabel 3.

Tabel 3. Data karakteristik Desa Ngancar tahun 2017

No.	Penduduk Ngancar	Jumlah (jiwa)	Presentase (%)
1.	Rasio jenis kelamin		
	a.Laki-Laki	2.428	50,3
	b. Perempuan	2.395	49,7
	Total	4.823	100
2.	Mata pencaharian		
	a. PNS	32	1,4
	b. Petani	1.944	89,7
	c. Wirausaha	86	3,9
	d. Swasta	56	2,5
	e. Lainnya	48	2,2
	Total	2.166	100

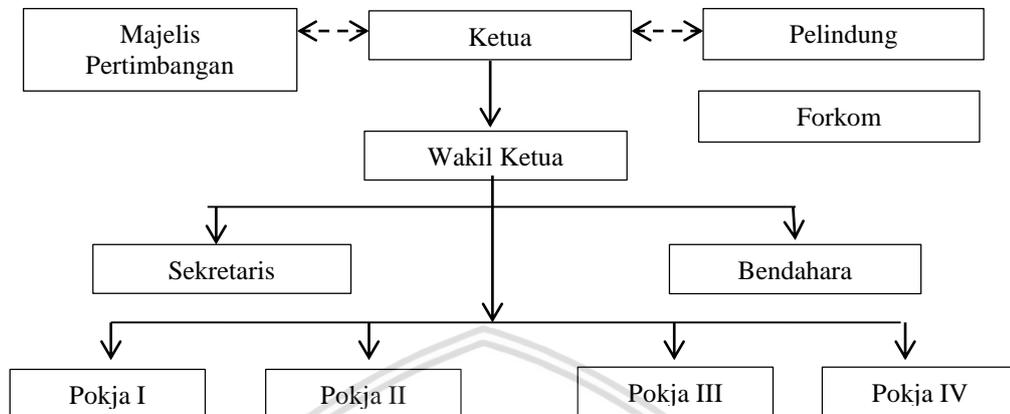
Sumber : Desa Ngancar (2018)

Berdasarkan data pada Tabel 3, rasio jenis kelamin di Desa Ngancar, jenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu sebesar 50,3 persen dibandingkan dengan perempuan. Mata pencaharian penduduk sebesar 89,7 persen atau sebanyak 1.944 jiwa. Banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai petani menggambarkan bahwa banyaknya masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dalam berusahatani.

5.1.3. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Lancar Jaya

Program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) mulai di perkenalkan di Kabupaten Kediri pada tahun 2005. Pada forum sosialisasi yang dilakukan, pihak desa harus menyediakan lembaga yang mewakili masyarakat desa hutan untuk bermitra dengan Perum Perhutani. Lembaga masyarakat desa

hutan (LMDH) berfungsi sebagai lembaga yang mewadahi aspirasi dan mengkoordinasikan masyarakat dalam kegiatan PHBM di Desa Ngancar. LMDH lancar jaya memiliki struktur organisasi yaitu seperti pada Gambar 7.



Gambar 7. Struktur organisasi LMDH Lancar Jaya

LMDH Lancar Jaya memiliki struktur kepengurusan yang aktif dalam melakukan pengorganisasian. Hal tersebut dibuktikan dengan rasa kekeluargaan yang ada diantara pengurus dan pokja antar dusun. Masing - masing individu memiliki rasa kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap keberlangsungan lembaga. Termasuk dalam hal kelengkapan atau ketersediaan hal-hal penunjang jalannya suatu kelembagaan. Salah satunya yaitu tersedianya sarana dan prasarana LMDH. Sarana dan prasarana tersebut yaitu bangunan kesekretariatan LMDH Lancar Jaya yang dibangun khusus untuk mendukung jalannya lembaga. Bangunan seluas 4 x 10 m² ini dibangun secara mandiri atas inisiatif pengurus LMDH. Sekretariat digunakan sebagai tempat pertemuan antar pengurus maupun anggota serta juga difungsikan sebagai koperasi masyarakat desa hutan (KMDH). Fasilitas yang telah disediakan oleh pengurus diharapkan dapat membantu menunjang kegiatan PHBM di Desa Ngancar.

Lembaga masyarakat desa hutan ini dijadikan wadah bagi warga Desa Ngancar yang tergabung sebagai anggota LMDH dalam pengelolaan hutan serta dalam rangka peduli terhadap kelestarian kawasan hutan Perum Perhutani KPH Kediri melalui kegiatan implementasi PHBM. Tujuan didirikannya LMDH adalah untuk mengupayakan :

- a. Mempertahankan keutuhan batas-batas wilayah hutan dan keberadaan (eksistensi) kelancaran serta kemajuan lembaga.

- b. Tercapainya peningkatan mutu sumberdaya manusia dari anggota untuk mengemban misi luhur dalam rangka pengamanan hutan lestari.
- c. Terwujudnya keselarasan keseimbangan dan keserasian hubungan kerja dan kepentingan warga desa, Perum Perhutani, dan pihak lain yang berkepentingan.
- d. Terwujudnya kelestarian Sumber daya hutan
- e. Tercapainya peningkatan kesejahteraan lahir dan batin anggota.
- f. Terwujudnya pengayoman dan perlindungan bagi anggota
- g. Terbinanya persatuan dan kesatuan anggota.

LMDH Lancar Jaya selain memiliki fungsi ekonomi juga memiliki fungsi sosial yaitu membantu yayasan panti asuhan “Budi Luhur” yang diatur secara resmi dalam perjanjian kerjasama pada tanggal 14 Juli 2012 sampai 14 Juli 2022. Bantuan berupa dana kepada anak yatim yang ada di yayasan “Budi Luhur” diberikan setiap satu kali dalam setahun. Hal tersebut menjelaskan bahwa LMDH secara rata memberikan bagi hasil kepada pihak yang membutuhkan.

5.2. Karakteristik Responden

Responden penelitian yang dilakukan di Desa Ngancar merupakan para petani yang ikut berpartisipasi dalam program PHBM. Jumlah petani yang dibutuhkan sebagai responden sebanyak 40 petani. Karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah usia petani, tingkat pendidikan, pengalaman berusahatani dan luas lahan garapan.

5.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Usia

Kemampuan petani dalam melakukan pengelolaan lahan pada kegiatan berusahatani salah satunya dipengaruhi oleh faktor usia petani. Usia petani yang mengikuti program PHBM di Desa Ngancar cukup beragam yaitu berkisar 30-60 tahun.

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Usia

No.	Usia (tahun)	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1.	30 – 40	14	35
2.	41 – 50	18	45
3.	51 – 60	5	12
4.	> 60	3	8
Total		40	100

Sumber: Data Primer (Diolah, 2018)

Berdasarkan Tabel 4 dapat terlihat bahwa rentang usia 40-50 menjadi usia mayoritas responden sebesar 45 persen. Sedangkan usia responden yang sedikit merupakan petani dengan usia > 60 tahun yaitu sebanyak 3 petani atau 8 persen dari total keseluruhan responden. Klasifikasi responden berdasarkan rentang umur seperti diatas dapat diartikan bahwa responden yang berada di Desa Ngancar termasuk pada usia produktif dalam melakukan kegiatan usahatani dan memiliki potensi untuk mengembangkan serta meningkatkan produktivitas usahatannya.

5.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan petani PHBM masih tergolong rendah karena mayoritas petani responden hanya mampu menyelesaikan pendidikannya pada tingkat SD, yaitu sebanyak 21 petani atau sebesar 52,5 persen. Berikut karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1.	Tamat SD	21	52,5
2.	Tamat SMP	17	42,5
3.	Tamat SMA	2	5
Total		40	100

Sumber: Data Primer (Diolah, 2018)

Banyaknya responden pada tingkat pendidikan tamat SD dan SMP menyebabkan petani kesulitan mencari pekerjaan lain seperti PNS atau karyawan. Kualifikasi syarat pekerjaan lain biasanya membutuhkan tenaga kerja dengan minimal pendidikan setara SMA/ sederajat. Menyikapi hal tersebut, petani dengan tingkat pendidikan yang rendah lebih memilih untuk berusahatani di lahan Perum Perhutani menjadi sumber penghasilan.

5.2.3. Luas Garapan Lahan

Status kepemilikan hak lahan adalah milik negara atas pengelolaan Perum Perum Perhutani yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Ngancar. Luas lahan yang digarap oleh petani berkisar antara 0,1 hektar hingga 0,3 hektar. Berikut adalah tabel luas lahan garapan petani di Desa Ngancar pada program PHBM.

Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Luas Lahan Garapan

No	Luas lahan garapan (ha)	Petani	Presentase (%)
1	0.1	28	70
2	0.2	10	25
3	0.3	2	5
Total		40	100

Sumber: Data Primer (Diolah,2018)

Petani responden melakukan usahatani tumpangsari dibawah tegakan pohon sengon. Sebanyak 28 petani atau 70 persen memiliki hak kelola lahan dengan luas 0,1 hektar. Adapun petani dengan luas lahan 0,2 hektar hanya dimiliki oleh 10 petani atau 25 persen serta petani dengan luas lahan terbesar 0,3 hektar sebanyak 2 orang atau 5 persen dari total keseluruhan. Secara rata-rata luas lahan yang dimiliki oleh petani di Desa Ngancar seluas 0,14 hektar setiap petani.

5.2.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Usahatani

Pengalaman melakukan usahatani di Desa Ngancar bisa dikatakan cukup berpengalaman. Sebanyak 24 orang atau 60 persen telah memiliki pengalaman usahatani selama 20 hingga 30 tahun. Para petani sudah pernah melakukan usahatani jauh sebelum adanya program PHBM. Berusahatani sudah dilakukan sejak petani remaja hingga sekarang. Namun, sebelum adanya program PHBM, petani menggarap pada lahan milik orang lain. Karakteristik petani berdasarkan pengalaman usahatani yaitu sebagai berikut.

Tabel 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Usahatani

No	Pengalaman Usahatani	Petani	Presentase (%)
1	< 20 tahun	10	25
2	20 - 30 tahun	24	60
3	> 30 tahun	6	15
Total		40	100

Sumber: Data Primer (Diolah,2018)

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa petani yang memiliki pengalaman usahatani < 20 tahun sebanyak 10 petani atau 25 persen. Sedangkan dengan pengalaman > 30 tahun sebanyak 6 petani atau 15 persen. Faktor biaya kehidupan yang harus dipenuhi menyebabkan petani tidak melanjutkan pendidikan dan memilih untuk menjadi petani.

5.3. Pelaksanaan Program PHBM di Desa Ngancar

Berdasarkan SK Direksi Perum Perhutani tahun 2009 menyatakan bahwa pengelolaan PHBM dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan secara berdaya, bersama dan berbagi dan memiliki prinsip untuk saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung serta memiliki kesadaran akan tanggung jawab bersama. Pelaksanaan program PHBM di Desa Ngancar dapat di deskripsikan dalam 3 hal yaitu kegiatan perencanaan, kegiatan produksi serta pelaksanaan hak dan kewajiban.

5.3.1. Perencanaan Program PHBM di Desa Ngancar

Program PHBM dilaksanakan di Desa Ngancar karena lokasi Desa Ngancar sebagian besar merupakan tanah milik perhutani yaitu sebesar 72 persen dari total luasan keseluruhan desa. Oleh karena itu, Desa Ngancar disebut sebagai Desa Magersaren. Menurut Konferensi Tenur (2017), Desa Magersaren merupakan desa yang menguasai tanah hutan negara yang dikelola oleh Perhutani. Tanah tersebut dipinjamkan Perhutani kepada masyarakat dan tidak berhak untuk mengklaim lahan tersebut. Selain itu, Desa Ngancar memiliki potensi dalam bidang pertanian.

Program PHBM mulai diperkenalkan di Desa Ngancar pada tahun 2005 yang diawali dengan perkenalan program melalui sebuah Forum PHBM yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani. Perum Perhutani mengundang beberapa desa di Kabupaten Kediri yang akan mengikuti program PHBM. Perum Perhutani mengundang perwakilan dari masing-masing desa seperti Perangkat Desa, Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH), serta perangkat pengurus LMDH yang telah dibentuk sebelumnya.

Forum PHBM menjelaskan mengenai Program PHBM serta pembentukan kesepakatan antara Perum Perhutani dengan LMDH. Setelah terjadi kesepakatan antara Desa Ngancar dengan Perum Perhutani maka agenda selanjutnya adalah melakukan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pengurus LMDH serta Perangkat Desa dan dihadiri oleh perwakilan masyarakat Desa Ngancar. Program PHBM di Desa Ngancar ditetapkan berdiri dan dapat berjalan secara aktif sejak ditanda tangannya perjanjian pada tanggal 12 Oktober 2005. Membutuhkan waktu dua

bulan hingga penandatanganan perjanjian pembentukan Program PHBM sekaligus dengan pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) merupakan lembaga yang menaungi masyarakat yang tergabung sebagai anggota pada program PHBM. Lembaga ini harus mampu mengkoordinir anggota lembaga serta memastikan berjalannya program serta mendukung suksesnya program hutan lestari melalui program PHBM. Lembaga ini juga berfungsi sebagai perantara penyampaian informasi dalam hal pengelolaan hutan antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan. Peresmian berdirinya LMDH disaksikan oleh perwakilan masyarakat Desa Ngancar, Perum Perhutani dan juga disaksikan oleh Notaris, maka terbentuklah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang diberi nama LMDH Lancar Jaya.

Perumusan tujuan, fungsi, keanggotaan, hak dan kewajiban, penyerahan bagi hasil serta pengaturan rapat kerja telah diatur berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Selain itu, pedoman kerjasama yang telah terjalin juga telah tercantum dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Perum Perhutani sebagai Pihak Pertama dengan LMDH Lancar Jaya sebagai Pihak Kedua. Perjanjian kerjasama ini menjelaskan beberapa ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pelaksanaan program PHBM di LMDH Lancar Jaya dimulai dengan pendataan anggota LMDH berdasarkan banyaknya Kepala Keluarga (KK) di Desa Ngancar. Pembagian hak petak lahan telah ditetapkan antara pengurus LMDH dengan pihak Perum Perhutani melalui KPH Kediri. Luas lahan yang dikelola dibagi secara rata berdasarkan banyaknya jumlah kepala keluarga yang berpartisipasi.

Kegiatan penanaman yaitu dengan menanam tanaman pokok atau tanaman tegakan produksi Perum Perhutani seperti pohon sengon. Selanjutnya setelah tanaman pokok berumur 2 tahun maka masyarakat baru bisa melakukan kegiatan budidaya dibawah tanaman tegakan tersebut. Perum Pehutani tidak menetapkan jenis komoditas yang boleh dan tidak boleh ditanam oleh masyarakat secara spesifik. Sehingga masyarakat memilih untuk melakukan usahatani pada empat

komoditas yaitu nanas, jagung, tomat dan cabai karena keempat komoditas tersebut sesuai dengan kondisi tanah di Desa Ngancar.

Hasil produksi usahatani masyarakat desa hutan 100 persen menjadi milik masyarakat. Namun, masyarakat juga harus memberikan hasil *share* usahatani kepada Perum Perhutani sebesar Rp 300.000,00 per tahunnya. Selain memberikan hasil *sharing*, masyarakat juga wajib menjaga tanaman pokok yang ditanam oleh Perum Perhutani dalam bentuk patroli bersama dengan Perhutani sebagai imbal jasa lingkungan atas lahan yang diberikan oleh Perum Perhutani kepada masyarakat desa hutan di Desa Ngancar.

Kegiatan pengamanan hutan di Desa Ngancar dibagi menjadi dua jenis penjagaan. Jenis pengamanan hutan yang pertama yaitu pengamanan pada tanaman sengon yang dilakukan setiap harinya yang dilaksanakan oleh pihak RPH Pandantoyo dengan masyarakat Desa Ngancar. Pengamanan setiap hari dilakukan di lokasi yang berbeda pada setiap dusun. Apabila hendak melakukan patroli, pihak RPH berkoordinasi dengan pengurus LMDH Lancar Jaya mengenai waktu serta jumlah tenaga masyarakat yang diperlukan dalam kegiatan patroli. Jenis pengamanan yang kedua yaitu pengamanan pada pokok tebangan. Apabila akan diadakan penebangan pohon sengon atau pemanenan pohon sengon, maka pihak RPH Pandantoyo berkoordinasi kepada LMDH Lancar Jaya perihal pengamanan tanaman tebangan tersebut. Kegiatan pengamanan dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi Perum Perhutani. Tindakan pelanggaran yang ditemukan pada kegiatan patroli akan diamankan ke kantor RPH Pandantoyo kemudian diberikan peringatan dalam surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala RPH Pandantoyo.

Peran serta masyarakat dalam program PHBM menjadi fokus pihak Perum Perhutani. Keaktifan masyarakat menentukan tingkat keberhasilan program PHBM. Pihak pengelola Resort Pangkuan Hutan (RPH) Pandantoyo merasakan manfaat dari peran serta masyarakat Desa Ngancar pada program PHBM. Manfaatnya yaitu merasa terbantu dalam menjaga kelestarian hutan. Selain itu, masyarakat anggota LMDH di Desa Ngancar juga merasakan banyaknya manfaat yang mereka terima dengan mengikuti program PHBM, yaitu dapat memanfaatkan lahan dibawah tegakan sehingga memberikan penambahan

pendapatan bagi masyarakat. Hasil usahatani masyarakat seluruhnya untuk petani LMDH, mereka hanya mengeluarkan dana sebesar Rp 300.000,00 pertahun sebagai hasil *share* usahatani kepada Perum Perhutani.

5.3.2 Kegiatan Produksi pada Program PHBM di Desa Ngancar

Kegiatan produksi pada program PHBM dibagi menjadi dua jenis yaitu produksi tanaman pokok Perum Perhutani (bagi hasil berupa kayu) dan tanaman tumpang-sari masyarakat desa hutan (bagi hasil bukan kayu). Ketentuan bagi hasil yang tertulis pada SK Direksi No. 682 Tahun 2009 menyatakan bahwa nilai dan proporsi berbagi dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat ditetapkan sesuai dengan masukan faktor produksi yang dikeluarkan oleh masing - masing pihak (masyarakat dan perusahaan) atas kesepakatan kedua belah pihak dan tercantum di dalam perjanjian kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan.

Ketentuan bagi hasil yang telah tercantum dalam Perjanjian Kerjasama antara Perum Perhutani dengan LMDH Lancar Jaya menjelaskan bahwa bagi hasil (*share*) kayu pada saat tebangan habis diberikan sebesar 25 persen setelah kayu terjual. Tanaman pokok pada PHBM di Desa Ngancar yaitu Sengon. Kegiatan panen pokok sengon di Desa Ngancar dilakukan hampir setiap tahun pada sekitar bulan Februari dan Maret. Hal tersebut dikarenakan jarak waktu penanaman yang berbeda setiap petak lahannya sehingga pada saat tanaman panen dapat dilakukan setiap tahunnya. Sedangkan untuk bagi hasil (*share*) non kayu seperti hortikultura oleh pihak masyarakat desa hutan telah ditetapkan tarif *share* yang harus diberikan kepada Perum Perhutani sebesar Rp. 300.000,00 per tahunnya.

Mekanisme penyerahan bagi hasil (*share*) kayu di Desa Ngancar berupa nilai uang (*fresh money*) setelah kayu terjual. Sebagai bukti transaksi secara administratif, maka dibuatkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Mekanisme tersebut juga berlaku dengan kegiatan usaha lainnya pada program PHBM.

5.3.3 Hak dan Kewajiban pada Program PHBM di Desa Ngancar

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan suatu program pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan

sebagai mitra kerja. Supaya keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat tercapai secara optimal dan proporsional maka kedua pihak harus menjalankan hak serta kewajiban secara seimbang. Ketentuan hak dan kewajiban telah tercantum dalam perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan. Berikut adalah hak dan kewajiban antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan.

Hak Perum Perhutani :

- a. Menyusun perencanaan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
- b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan pola PHBM sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya.
- c. Memperoleh dukungan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai tujuan akhir yaitu keberhasilan dan kelestarian hutan secara mandiri.
- d. Menentukan, merubah dan menetapkan lokasi petak hutan wilayah pengakuan desa untuk kegiatan pengelolaan hutan.
- e. Memberikan sanksi berupa pencabutan/penggarapan tanaman tumpangsari dan pencabutan kerjasama secara sepihak tanpa ganti rugi apabila LMDH Lancar Jaya melakukan alih garapan.

Kewajiban Perum Perhutani :

- a. Menentukan lokasi yang dijadikan objek pengelolaan hutan bersama masyarakat.
- b. Mengatur sistem dan pola tanam untuk tanaman hutan dan tumpangsari.
- c. Menyediakan semua kebutuhan kegiatan yang berhubungan dengan tanaman kehutanan.
- d. Memberikan bimbingan teknis penanaman, pemeliharaan, penjarangan, dan pengamanan tanaman hutan kepada LMDH Lancar Jaya.
- e. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada LMDH Lancar Jaya.
- f. Bersama masyarakat menjaga dan melindungi sumberdaya hutan, status hutan dipertahankan dan juga dalam hal keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.
- g. Memberikan bagi hasil hutan kayu dari hasil tanaman hutan kepada LMDH Lancar Jaya sesuai kesepakatan yaitu 25 %.

- h. Ikut serta dan berperan aktif dalam mendukung kegiatan mulai dari kegiatan sosialisasi, teknis (budidaya, pengelolaan, pemeliharaan, pemanenan dan lainnya) dan non teknis (pemasaran, usaha koperasi, publikasi dan lainnya).
- i. Mengawasi proses kegiatan penanaman, perlindungan hutan dan tanaman tumpangsari pada objek yang di kerjasamakan.

Hak LMDH Lancar Jaya :

- a. Bersama Perum Perhutani menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PHBM.
- b. Mengelola dan memperoleh hasil budidaya tanaman tumpangsari yang dibudidayakan di lokasi objek yang dikerjasamakan.
- c. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan teknis kegiatan PHBM.
- d. Menerima bagi hasil hutan kayu dengan nilai dan proporsi yang telah disepakati.
- e. Mendapatkan dukungan dari anggota kelompok atau aparat setempat tingkat Desa/Kecamatan/Kabupaten dalam rangka melindungi dan melestarikan sumberdaya hutan.

Kewajiban LMDH Lancar Jaya :

- a. Bersama Perum Perhutani menjaga, melindungi dan melestarikan sumberdaya hutan yang menjadi wilayah penguannya.
- b. Menanam dan memelihara tanaman hutan dan tanaman tumpangsari sesuai dengan ketentuan Perum Perhutani.
- c. Ikut aktif dalam mensosialisasikan program PHBM kepada anggotanya.
- d. Berperan aktif dalam menghindari, mencegah, dan menghentikan upaya-upaya pihak lain yang akan merugikan atau mengganggu tanaman hutan.
- e. Mengkoordinasikan pemanenan dan pemasaran hasil usaha budidaya tanaman tumpangsari.
- f. Membina dan melarang anggotanya mengalihkan garapannya kepada pihak lain.

Pemaparan hak dan kewajiban yang telah disepakati dan tercantum dalam perjanjian kerjasama menjadi pedoman dan pemahaman bagi kedua belah pihak mengenai hal-hal apa yang wajib dilakukan dan didapatkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa hak dan kewajiban yang belum

dilaksanakan di lapangan. Berikut adalah penjelasan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban PHBM di Desa Ngancar.

Tabel 8. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban PHBM di Desa Ngancar

Instansi	Hak/Kewajiban	Implementasi lapangan
Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kediri	<p>a. Hak</p> <p>Memberikan sanksi berupa pencabutan/penggarapan tanaman tumpangsari dan pencabutan kerjasama secara sepihak apabila LMDH Lancar Jaya melakukan alih garapan.</p> <p>b. Kewajiban</p> <p>Ikut serta dan berperan aktif dalam mendukung kegiatan mulai dari kegiatan sosialisasi, teknis (budidaya, pengelolaan, pemeliharaan, pemanenan dan lainnya) dan non teknis (pemasaran, usaha koperasi, publikasi dan lainnya).</p>	<p>Kondisi lapangan, peneliti menemukan bahwa terdapat masyarakat yang mengalihkan lahan garapannya dengan sistem sewa lahan. Namun, belum ada sanksi yang diterima oleh masyarakat.</p> <p>Kondisi di lapang menunjukkan bahwa LMDH masih belum bisa mengkoordinir pemasaran masyarakat desa hutan. Hal itu menandakan bahwa KPH belum optimal dalam membantu maupun mendukung proses non teknis secara keseluruhan.</p>
LMDH Lancar Jaya	<p>a. Kewajiban</p> <p>1. Mengkoordinasikan pemanenan dan pemasaran hasil usaha budidaya tanaman tumpang- sari</p> <p>2. Membina dan melarang anggotanya mengalihkan garapannya kepada pihak lain.</p>	<p>1.LMDH Lancar Jaya belum menjalankan kewajiban dalam hal pengumpulan pemanenan dan pemanenan hasil usaha budidaya.</p> <p>2.Belum adanya pembinaan maupun tindak lanjut mengenai pengalihan lahan garapan yang terjadi</p>

Sumber : Data Primer (2018)

Pelaksanaan hak dan kewajiban pada program PHBM di Lancar Jaya belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai isi perjanjian sehingga pelaksanaan hak dan kewajibannya belum terlaksana secara optimal. Pengurus LMDH Lancar Jaya belum mampu memberikan penjelasan mengenai isi hak dan kewajiban program PHBM kepada seluruh anggota sehingga masih ada dari masyarakat yang belum

melaksanakan kewajibannya. Selain itu, KPH Kediri juga belum mampu mendukung kegiatan non teknis secara keseluruhan. Hak dan kewajiban yang telah tercantum dalam perjanjian kerjasama merupakan hasil dari kesepakatan bersama antara LMDH Lancar Jaya dan Perum Perhutani sehingga dapat dipastikan bahwa kedua belah pihak sudah harus mengerti dan memahami mengenai isi perjanjian kerjasama tersebut.

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kediri masih belum melaksanakan beberapa hak dan kewajiban. Hak yang belum dilaksanakan oleh KPH Kediri yaitu memberikan sanksi kepada anggota LMDH yang mengalihkan lahan garapannya kepada pihak lain. Berdasarkan keterangan petani yang menyewakan lahan garapannya ke pihak lain, mereka menyewakan lahan dikarenakan kurangnya ketersediaan modal untuk melakukan budidaya. Selain itu, luasan lahan yang relatif kecil membuat beberapa petani memilih untuk menyewakannya kepada pihak lain. Berdasarkan keadaan dilapangan, belum ada tindakan lanjut dari pihak Perum Perhutani khususnya KRPH (Kepala Resort Pemangkuan Hutan) kepada masyarakat yang melakukan penyimpangan dalam hal alih guna lahan. Hal ini yang membuat masyarakat tetap melakukan penyimpangan seperti ini.

Perum Perhutani belum menjalankan satu kewajibannya yaitu ikut serta dalam membantu dan mendukung kegiatan pemasaran hasil budidaya. Perum Perhutani belum melakukan pembinaan kepada LMDH Lancar Jaya mengenai pengaturan pemasaran hasil produksi tanaman tumpang sari. LMDH Lancar Jaya belum mampu melaksanakannya karena belum sepenuhnya memahami dan menguasai sistem pengumpulan dan pemasaran komoditi pertanian. Hal ini dibuktikan bahwa koperasi LMDH Lancar Jaya belum mampu menampung dan mengkoordinir hasil dari budidaya petani di Desa Ngancar. Masyarakat desa hutan menjual hasil tanaman tumpang sari mereka kepada tengkulak karena mereka merasa lebih efisien dan efektif karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya pemanenan karena tengkulak membeli dengan sistem tebasan.

Pelaksanaan hak dan kewajiban antara Perum Perhutani dan LMDH Lancar Jaya diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga akan mencapai tujuan dari program PHBM tersebut. Berdasarkan hasil diatas maka dapat

disimpulkan secara keseluruhan mengenai pelaksanaan program PHBM di Desa Ngancar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Kesimpulan Pelaksanaan Program PHBM di Desa Ngancar

No	Kegiatan	Kesimpulan
1.	Kegiatan Perencanaan	<p>a. Program PHBM di Desa Ngancar sudah ada sejak tahun 2005. Diawali dari pertemuan pengenalan hingga pendataan masyarakat yang berpartisipasi. Desa Ngancar memiliki Kawasan hutan pangkuan desa seluas 517 Ha.</p> <p>b. LMDH Lancar Jaya dibentuk untuk mengkoordinir masyarakat desa hutan dalam melaksanakan kegiatan pada program PHBM. Selain itu juga merumuskan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).</p> <p>c. Luas lahan yang dikelola oleh masyarakat dibagi secara rata berdasarkan banyaknya jumlah kepala keluarga. Komoditas yang ditanam yaitu nanas, jagung, tomat dan cabai karena keempat komoditas tersebut sesuai dengan kondisi tanah di Desa Ngancar. Perum Perhutani belum merasakan kerusakan dalam hal ekologi hutan terhadap kegiatan usahatani yang dilakukan sehingga masyarakat tetap pada komoditas pilihan mereka.</p> <p>d. Kegiatan pengaman hutan dilakukan dalam bentuk patroli. Patroli dilakukan setiap hari pada tanaman tegakan dan tanaman tebangan. Kegiatan ini dilakukan bersama oleh masyarakat dan RPH Pandantoyo.</p>
2.	Kegiatan Produksi	<p>a. Kegiatan produksi dibagi menjadi dua jenis yaitu produksi tanaman pokok Perhutani dan tanaman tumpang sari masyarakat desa hutan.</p> <p>b. Hasil produksi tanaman tegakan diberikan share sebesar 25 persen dari total penjualan tanaman pokok yang diberikan oleh Perhutani kepada masyarakat desa hutan</p> <p>c. Hasil produksi tanaman tumpang sari masyarakat desa hutan dengan share sebesar Rp.300.000 per tahun kepada Perhutani.</p> <p>d. Mekanisme penyerahan hasil share diberikan dalam bentuk uang (<i>fresanalisis h money</i>). Bukti transaksi secara administratif dalam bentuk berita acara yang dibuat oleh Perhutani.</p>

No	Kegiatan	Kesimpulan
3.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban	<p>a. Anggota LMDH Lancar Jaya masih belum memahami isi perjanjian kerjasama sehingga melakukan pelanggaran. Selain itu, pengurus LMDH Lancar Jaya belum melakukan tindakan lanjut terhadap pengalihan lahan garapan.</p> <p>b. KPH Kediri belum memberikan sanksi kepada masyarakat yang mengalihkan lahan garapannya. Hal ini membuat masyarakat akan tetap melakukan pelanggaran tersebut.</p> <p>c. KPH Kediri belum mampu melakukan pembinaan maupun pelatihan dalam membantu memasarkan hasil pertanian masyarakat desa hutan.</p>

Berdasarkan pelaksanaan program PHBM dilihat dari perencanaan program, kegiatan produksi serta pelaksanaan Hak dan Kewajiban antara masyarakat desa hutan dengan Perum Perhutani dapat diketahui bahwa pelaksanaan program PHBM sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Dikatakan cukup baik karena dalam SK Direksi Perum Perhutani No.682 tahun 2009 telah diatur mengenai persyaratan pelaksanaan PHBM yang baik meliputi delapan indikator. Terdapat dua indikator dari delapan indikator persyaratan tersebut yang belum cukup terlaksana dengan baik. Hal tersebut yaitu mengenai aturan-aturan yang mengikat dan pemahaman yang utuh terhadap konsep PHBM seperti peraturan untuk tidak mengalihkan lahan garapan ke pihak lain, peraturan ini cukup mengikat namun karena kurangnya pemahaman yang utuh dari anggota LMDH mengenai hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan menyebabkan hal tersebut terjadi.

5.4. Analisis Usahatani Desa Ngancar

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat merupakan suatu kegiatan program yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Masyarakat ikut dalam mengelola, memanfaatkan dan menjaga kelestarian sumberdaya hutan disekitarnya. Sebagai bentuk imbalan kepada masyarakat, Perum Perhutani memberikan hak kelola lahan yang masih dalam status kepemilikan negara untuk dapat digunakan dalam melakukan budidaya tanaman tumpangsari dalam upaya untuk menambah penghasilan masyarakat desa hutan.

Masyarakat Desa Ngancar melakukan budidaya dengan komoditas nanas, jagung, cabai dan tomat. Berikut adalah analisis biaya variabel dan biaya tetap per satu hektar per tahun berdasarkan pola tanam yang dibudidayakan oleh masyarakat desa hutan di Desa Ngancar.

Tabel 10. Analisis Biaya Produksi Berdasarkan Pola Tanam pada program PHBM

No	Komoditas	Biaya Tetap (Rp/thn)	Biaya Variabel (Rp/ha/thn)	Total Biaya (Rp/ha/thn)
1.	Nanas	285.400	12.292.600	12.578.000
2.	Jagung,Cabai,Jagung	121.389	73.801.875	75.015.764
3.	Jagung,Tomat,Cabai	211.660	63.413.344	65.022.011
4.	Jagung,Tomat,Jagung	235.491	40.810.733	42.176.580
5.	Jagung,Nanas	59.000	15.063.750	15.653.750
6.	Jagung,Cabai	152.639	30.575.625	31.33.8819
7.	Cabai,Jagung,Cabai	174.861	74.902.500	76.651.111
8.	Cabai,Nanas	126.861	42.116.667	43.080.811
9.	Tomat,Jagung,Tomat	308.250	63.947.813	65.982.263
10.	Tomat,Nanas	191.181	34.385.588	35.647.379

Sumber: Data Primer (Diolah,2018)

Penggunaan biaya produksi pada penelitian ini berbeda pada setiap komoditas karena kebutuhan faktor produksi yang berbeda. Pada Tabel 10 diketahui bahwa biaya produksi setiap pola tanam. Petani yang melakukan budidaya dengan pola tanam perpaduan antara jagung, cabai dan tomat memiliki biaya yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan biaya variabel seperti penggunaan pupuk, pestisida dan biaya tenaga kerja yang tinggi menyebabkan besarnya biaya yang dikeluarkan.

Petani yang menanam cabai dan tomat harus mengeluarkan biaya produksi yang tinggi pada faktor produksi pupuk dan tenaga kerja. Pupuk yang digunakan untuk kedua komoditas ini cukup beragam dan rutin diaplikasikan sehingga membuat biaya pupuk meningkat. Selain pupuk, petani juga harus mengeluarkan banyak biaya pada penyediaan tenaga kerja. Hal tersebut disebabkan oleh biaya perawatan dan pemanenan yang dilakukan secara berkala sehingga akan meningkatkan biaya dalam hal ini tenaga kerja.

Petani yang melakukan pola tanam dengan memadukan tanaman nanas, memiliki tingkat pengeluaran biaya yang cukup rendah. Hal ini disebabkan karena pada budidaya nanas, petani tidak terlalu mengeluarkan biaya yang tinggi dalam hal perawatan tanaman nanas dan juga dalam hal biaya tenaga kerja. Pada saat

pemanenan tanaman nanas, petani menjual hasil produksinya dengan sistem borongan sehingga petani tidak memerlukan biaya pada kegiatan pemanenan.

Berdasarkan analisis biaya produksi, dapat diketahui besarnya biaya yang dikeluarkan untuk setiap faktor produksi yang dikeluarkan pada setiap komoditas. Selanjutnya pada Tabel 11 merupakan analisis usahatani yang disajikan dalam luasan secara rata-rata dan luasan per hektar lahan.

Tabel 11. Analisis Usahatani Berdasarkan Pola Tanam pada program PHBM

No	Pola Tanam	Total Biaya (Rp/ha/thn)	Total Penerimaan (Rp/ha/thn)
1.	Nanas	12.578.000	46.945.200
2.	Jagung,Cabai,Jagung	75.015.764	133.250.000
3.	Jagung,Tomat,Cabai	65.022.011	142.810.800
4.	Jagung,Tomat,Jagung	42.176.580	131.080.000
5.	Jagung,Nanas	15.653.750	82.750.000
6.	Jagung,Cabai	31.33.8819	90.000.000
7.	Cabai,Jagung,Cabai	76.651.111	163.680.000
8.	Cabai,Nanas	43.080.811	91.352.000
9.	Tomat,Jagung, Tomat	65.982.263	136.785.000
10.	Tomat,Nanas	35.647.379	82.714.500

Sumber : Data Primer (Diolah,2018)

Tabel 11 merupakan hasil perhitungan total biaya dan total penerimaan usahatani petani berdasarkan pola tanam. Total Penerimaan yang disajikan merupakan penerimaan berdasarkan pola tanam dan di konversikan ke dalam satu hektar. Berdasarkan tabel diatas, usahatani yang menggunakan pola tanam antara jagung, cabai dan tomat memiliki penerimaan yang tinggi. Hal ini dikarenakan pada tanaman jagung, cabai dan tomat memiliki waktu panen yang cepat sehingga penerimaan dalam satu tahun dapat diterima lebih dari satu musim panen. Selain itu, harga komoditas jagung, nanas dan tomat yang relatif tinggi yaitu secara rata-rata dengan harga Rp 1.500,00/kg untuk tanaman jagung, Rp 12.000,00/kg untuk tanaman cabai dan Rp 3000,00/kg untuk tanaman tomat.

Pola tanam dengan memadukan tanaman semusim dengan tanaman nanas memiliki penerimaan yang relatif kecil. Hal ini dikarenakan tanaman nanas memiliki masa tanam yang lama sehingga penerimaan yang akan di dapat apabila dikonversi dalam satu tahun akan memberikan penerimaan yang sedikit. Selain itu, harga jual nanas yang rendah yaitu sebesar Rp 3000,00/kg dan sistem borongan yang dilakukan pada saat panen menyebabkan penerimaan petani yang

tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan melakukan pola tanam tanaman semusim dalam satu tahun.

5.4.1. Analisis Pendapatan Usahatani

Pendapatan usahatani merupakan selisih antara penerimaan usahatani dengan biaya usahatani. Analisis pendapatan dapat mengukur sejauh mana keberhasilan suatu usahatani yang nantinya akan diketahui gambaran usahatani saat ini sehingga dapat digunakan untuk evaluasi dan perencanaan kegiatan usahatani yang akan datang. Hasil pendapatan usahatani dapat diketahui pada tabel berikut.

Tabel 12. Pendapatan Usahatani Berdasarkan Pola Tanam pada program PHBM

No	Pola Tanam	Pendapatan per rata-rata luas lahan (Rp/thn)	Pendapatan (Rp/ha/thn)
1.	Nanas	4.840.445	34.367.159
2.	Jagung,Cabai,Jagung	5.823.423	58.234.236
3.	Jagung,Tomat,Cabai	10.235.370	77.788.815
4.	Jagung,Tomat,Jagung	15.328.176	88.903.420
5.	Jagung,Nanas	6.709.625	67.096.250
6.	Jagung,Cabai	11.732.236	58.661.181
7.	Cabai,Jagung,Cabai	8.709.889	87.098.889
8.	Cabai,Nanas	6.351.472	48.271.189
9.	Tomat,Jagung,Tomat	10.727.688	70.802.738
10.	Tomat,Nanas	7.131.382	47.067.121

Sumber : Data Primer (Diolah,2018)

Pada Tabel 12 merupakan pendapatan usahatani yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan pola tanam. Pada tabel diatas disajikan total pendapatan secara luasan rata-rata per pola tanam dan pendapatan yang telah di konversi dalam perhitungan satu hektar lahan. Luasan rata-rata pada masing-masing pola tanam berbeda-beda. Sehingga dilakukan asumsi perhitungan dalam satu hektar luas lahan.

Berdasarkan hasil perhitungan pendapatan usahatani, pendapatan tertinggi dalam satu tahun merupakan petani dengan pola tanam tanaman semusim yaitu variasi antara tanaman cabai, jagung dan tomat. Hal ini dapat terlihat pada Tabel 12, petani yang melakukan budidaya dengan pola tanam tanaman semusim seperti jagung, cabai dan tomat memiliki tingkat pendapatan antara Rp 58.234.236 hingga Rp 88.903.420 per hektar per tahun. Sedangkan petani dengan pola tanam dengan

variasi tanaman semusim dan nanas memiliki tingkat pendapatan berkisar antara Rp 34.367.159 hingga Rp 67.096.250 per hektar per tahun.

Tingginya pendapatan yang diterima oleh petani dengan pola tanam tanaman semusim disebabkan oleh masa rotasi panen yang dilakukan dalam satu tahun. Petani yang melakukan usahatani dengan pola tanam tanaman semusim, melakukan tiga kali proses budidaya dalam satu tahun dan memiliki variasi dalam pola tanam. Sehingga pendapatan yang akan diterima juga akan tinggi sejalan dengan banyaknya rotasi panen yang dilakukan dalam satu tahun.

Petani yang melakukan usahatani nanas maupun menggunakan pola tanam variasi nanas dan tanam semusim memiliki pendapatan yang relatif rendah. Hal ini disebabkan musim tanam nanas yang lama sehingga waktu pengembalian pendapatan juga akan dipengaruhi dalam satu tahun. Petani nanas masih melakukan usahatani nanas disebabkan karena kecilnya resiko kegagalan dalam melakukan usahatani nanas. Selain itu, biaya perawatan yang rendah juga menjadi pertimbangan petani dalam melakukan usahatani nanas. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka petani yang menggunakan pola tanam tanaman semusim dalam satu tahun akan memberikan pendapatan yang lebih tinggi.

5.4.2. Kelayakan Usahatani

Kelayakan usahatani dapat dianalisis dengan menggunakan Analisis R/C rasio (*Return Cost Ratio*). Analisis RC rasio merupakan perbandingan antara penerimaan dan biaya produksi. Analisis tersebut akan menunjukkan tingkat efisiensi ekonomi dari usahatani yang dilakukan. Suatu usahatani dikatakan efisien dan layak untuk dikembangkan apabila nilai R/C Ratio > 1 (lebih dari satu). Berikut merupakan tabel hasil perhitungan R/C Rasio.

Tabel 13. R/C Rasio Usahatani Berdasarkan Pola Tanam pada program PHBM

No	Pola Tanam	R/C Rasio
1.	Nanas	2,1
2.	Jagung,Cabai,Jagung	2,5
3.	Jagung,Tomat,Cabai	2,2
4.	Jagung,Tomat,Jagung	3,1
5.	Jagung,Nanas	2,1
6.	Jagung,Cabai	2,9
7.	Cabai,Jagung,Cabai	2,5
8.	Cabai,Nanas	2,0
9.	Tomat,Jagung,Tomat	2,5
10.	Tomat,Nanas	2,0

Hasil analisis R/C rasio yang disajikan pada Tabel 13 merupakan tingkat efisiensi usahatani yang dilakukan oleh masyarakat desa hutan berdasarkan pola tanam yang dilakukan. Berdasarkan hasil analisis, usahatani yang dilakukan oleh masyarakat desa hutan dikatakan layak untuk di budidayakan. Hal tersebut dapat terlihat bahwa nilai R/C rasio dari seluruh usahatani berdasarkan pola tanam menunjukkan nilai lebih dari satu, sehingga dapat disimpulkan usahatani yang dilakukan oleh masyarakat desa hutan di Desa Ngancar layak untuk di budidayakan.

5.5. Analisis *Stakeholder* PHBM di Desa Ngancar

Analisis *stakeholder* bertujuan untuk mengetahui arah kebijakan sebagai bentuk kontribusi dalam penguatan kebijakan dan gambaran yang telah dimiliki dengan jelas mengenai kepentingan, kekuasaan, kekuatan serta besarnya pengaruh masing-masing *stakeholder* (Yuliansyah,2016). *Stakeholder* yang diteliti merupakan instansi, individu maupun kelompok sosial yang mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh kebijakan suatu sistem tersebut.

Kelompok LMDH merupakan lembaga masyarakat desa hutan yang menaungi seluruh masyarakat desa hutan pada program PHBM yang telah disadari bahwa kelompok ini memiliki kepentingan dalam kerjasama PHBM. *Stakeholder* lainnya yang memiliki peran dan berkepentingan dalam sistem PHBM diluar pihak Perum Perhutani yaitu Dinas Kehutanan UPT Pengelolaan Hutan Wilayah IV Kediri, dan Pemerintah Desa.

Program PHBM merupakan suatu program yang dilaksanakan antara Perum Perhutani (KPH Kediri) dengan LMDH Lancar Jaya sebagai mitra kerja. Perum Perhutani (KPH Kediri) merupakan perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hutan negara. Perum Perhutani melakukan perencanaan, mengorganisasikan dan melaksanakan program yang kemudian dibantu oleh LMDH yang merupakan lembaga yang mewadahi serta menjembatani antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan. Melaksanakan suatu kegiatan yang berkaitan mengenai PHBM, Perum Perhutani meminta bantuan Dinas Kehutanan UPT Pengelolaan Hutan Wilayah IV Kehutanan Kediri untuk mengorganisir masyarakat sebagai peserta kegiatan melalui pemerintah desa. Keterlibatan beberapa aktor tersebut yang nantinya akan

bersinergi serta akan memberikan manfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5.5.1 Identifikasi Pengaruh dan Kepentingan *Stakeholder*

Analisis *stakeholder* dilakukan untuk mengetahui untuk peran dan bagaimana pelaksanaan tugas dari setiap *stakeholder* terkait dengan kelembagaan PHBM. Seluruh *stakeholder* memiliki kepentingan dan pengaruh yang berbeda dalam PHBM. Hasil penilaian kepentingan dan pengaruh dapat dilihat pada Tabel 14 berikut ini.

Tabel 14. Penilaian *stakeholder* berdasarkan kepentingan dan pengaruh

No	<i>Stakeholder</i>	Kepentingan	Pengaruh
1.	LMDH Lancar Jaya	24	14
2.	KPH Kediri	22	21
3.	Dinas Kehutanan	11	7
4.	Pemerintah Desa	12	6

Sumber : Data Primer (2018)

Berdasarkan penilaian kepentingan dan pengaruh dari masing-masing *stakeholder*, langkah selanjutnya yaitu melakukan pemetaan *stakeholder* untuk mengetahui peran masing-masing *stakeholder* dalam pengelolaan PHBM di Desa Ngancar. Pemetaan aktor grid pada pengelolaan PHBM di Desa Ngancar tersaji pada Gambar 8.



Sumber : Data Primer (2018)

Gambar 8. Pemetaan *Stakeholder* berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh pelaksanaan PHBM di Desa Ngancar.

Pemetaan *stakeholder* yang telah dilakukan memudahkan dalam menganalisis tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing *stakeholder* pada pelaksanaan program PHBM di Desa Ngancar. Penjelasan mengenai pemetaan *stakeholder* adalah sebagai berikut :

A. Kuadran I (*Subject*)

Subject merupakan *stakeholder* yang berada pada kuadran I dengan nilai kepentingan tinggi pada PHBM namun memiliki pengaruh yang rendah. Pada pengelolaan PHBM di Desa Ngancar, tidak ada *stakeholder* yang berada di kuadran tersebut. Hal tersebut dikarenakan diantara keempat *stakeholder* yang diteliti, hampir seluruhnya memiliki pengaruh cukup tinggi terhadap pelaksanaan program PHBM.

B. Kuadran II (*Players*)

Stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi dapat terlihat terlihat pada kuadran II. *Stakeholder* yang berada ada kuadran tersebut yaitu KPH Kediri dan LMDH Lancar Jaya.

1. KPH Kediri (Perum Perhutani)

KPH Kediri diketahui memiliki tingkat kepentingan yang tinggi. KPH Kediri disebut sebagai pihak pertama yang memiliki peran sebagai pihak yang merumuskan kebijakan dan pengaturan PHBM. Keberadaan program PHBM di Desa Ngancar memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya yang tinggal disekitar hutan produksi Perum Perhutani. Tingkat kepentingan KPH Kediri terhadap program PHBM dapat dikatakan tinggi. Kepentingan KPH Kediri pada program PHBM yaitu KPH Kediri sebagai pihak yang menggagas atau pihak yang membentuk program PHBM, KPH Kediri selaku bagian dari Perum Perhutani melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksana sekaligus sebagai pengawas kegiatan PHBM. Kebijakan mengenai program PHBM dirancang oleh Perum Perhutani yang kemudian melibatkan LMDH (masyarakat) dalam mendiskusikan kebijakan tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama.

Peran Perum Perhutani di Desa Ngancar sangat penting dan memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan program, sebagai contoh yaitu setelah adanya program PHBM masyarakat merasa terbantu dalam hal penambahan pendapatan mereka, selain itu kegiatan pembinaan dalam hal usaha produktif yang

dilaksanakan oleh Perum Perhutani memberikan manfaat bagi masyarakat. Manfaat kegiatan program PHBM bagi Perum Perhutani yaitu sebagai sumber penerimaan baik dari hasil hutan tebangan yang dijaga oleh masyarakat, sekaligus penerimaan yang diterima oleh perhutani dari hasil *share* usahatani masyarakat desa hutan.

Bentuk wewenang yang dimiliki oleh Perum Perhutani yaitu memiliki kewenangan dalam mengadakan beberapa kegiatan yang dapat menunjang proses PHBM, memiliki kewenangan dalam pemberian sanksi serta memiliki kekuatan yang dapat mendukung berjalannya program PHBM. Kekuatan yang dimiliki oleh Perum Perhutani berupa sumberdaya yang memadai seperti petugas yang ahli di bidangnya, selain itu anggaran yang cukup serta informasi yang akurat mengenai program PHBM. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Perum Perhutani mampu mempengaruhi *stakeholder* lain seperti pengaturan pembagian lahan, pemutusan atau perpanjangan perjanjian.

2. LMDH Lancar Jaya

Tingkat kepentingan LMDH Lancar Jaya terhadap program PHBM sangat tinggi. Hal ini dapat diketahui pada ketergantungan LMDH Lancar Jaya kepada hutan yang berada di sekeliling desa. Lahan hutan yang diberikan hak kelola oleh Perum Perhutani dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan usahatani tumpangsari. Tingkat pengaruh LMDH Lancar Jaya pada pelaksanaan program PHBM sangat tinggi. Hal ini karena LMDH dilibatkan dalam pengambilan keputusan dari hasil musyawarah hasil rapat anggota setiap tahunnya untuk ikut mengevaluasi kegiatan PHBM menjadi lebih baik untuk kedepannya. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan serta pengamanan hutan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan suatu program. Berfokus pada imbal jasa lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat selaku aktor yang menjalankan program memberikan manfaat antara kedua pihak yaitu masyarakat desa hutan dan Perum Perhutani.

C. Kuadran III (*Bystander*)

Stakeholder dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah terdapat pada kuadran III yang disebut *Bystander*. *Stakeholder* yang berada pada kuadran ini yaitu Dinas Kehutanan dan Pemerintah Desa.

1. Dinas Kehutanan (UPT PHW IV)

Dinas Kehutanan (UPT Pengelolaan Hutan Wilayah) memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan yang rendah. Hal ini karena adanya pengalihan pengelolaan hutan produksi dari Dinas Kehutanan menjadi Perum Perhutani. Dinas Kehutanan berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan Perum Perhutani. Perum Perhutani berkoordinasi bersama Dinas Kehutanan apabila akan melakukan suatu kegiatan yang berkenaan dengan PHBM di desa. Dinas kehutanan kemudian yang akan memberikan informasi kepada pemerintah desa untuk mengkoordinasikan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Selain itu, Dinas Kehutanan juga berperan sebagai saksi terkait adanya tanda tangan perjanjian antara Perum Perum Perhutani dan LMDH Lancar Jaya.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Ngancar juga memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan yang rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Ngancar bahwa pemerintah desa hanya sebagai fasilitator dalam hal penyedia sarana dan prasarana untuk kegiatan sosialisasi maupun rapat. Pemerintah desa tidak memiliki wewenang terhadap pelaksanaan program PHBM karena pada umumnya Perum Perhutani langsung berkoordinasi dengan LMDH kemudian LMDH memberikan informasi berupa undangan kepada Kepala desa untuk dapat mendukung terkait kegiatan PHBM.

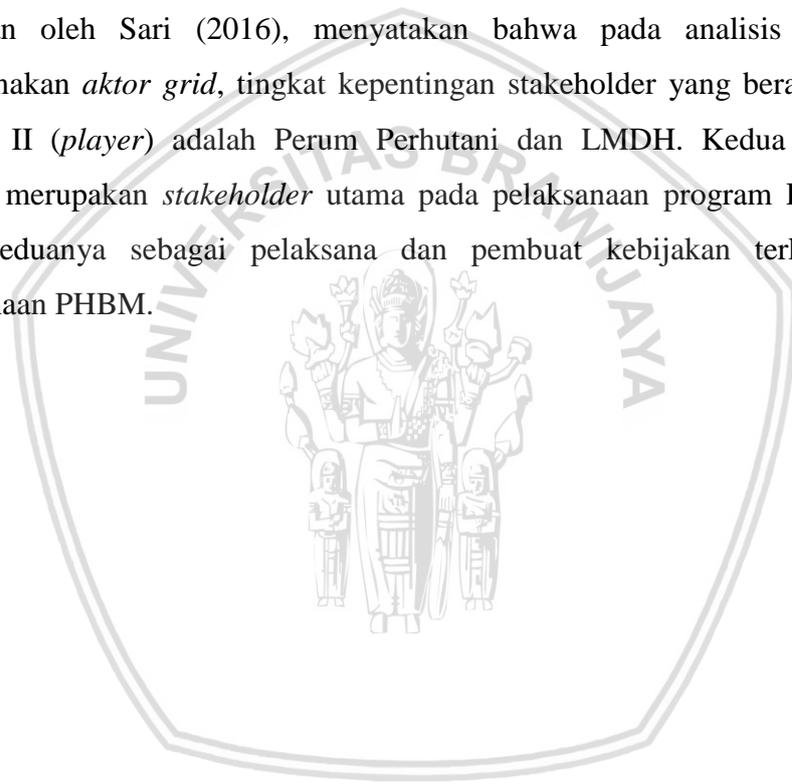
D. Kuadran IV (*Actor*)

Stakeholder yang berada pada kuadran IV merupakan *stakeholder* yang memiliki pengaruh tinggi namun tingkat kepentingannya rendah pada pelaksanaan PHBM di Desa Ngancar. Namun, tidak ada *stakeholder* yang berada pada kuadran ini. Pelaksanaan program PHBM di Desa Ngancar melibatkan stakeholder dalam pelaksanaannya sehingga dilihat dari tingkat kepentingannya maka hampir seluruh *stakeholder* memiliki tingkat kepentingan cukup tinggi.

Kelembagaan yang efektif dapat terlihat dari tingginya tingkat kepentingan suatu *stakeholder*. *Stakeholder* yang menunjukkan kepentingan yang tinggi terletak pada kuadran II (*player*). Berdasarkan hasil analisis menggunakan *aktor grid*, kepentingan *stakeholder* yang menempati posisi di kuadran II yaitu LMDH Lancar Jaya dan Perum Perhutani yang merupakan *stakeholder* utama dalam

pelaksanaan program PHBM. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada pada SK Direksi Perhutani No.682 tahun 2009 yang menyatakan bahwa program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dilaksanakan oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan jiwa berbagi, sehingga tercapainya keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional demi kepentingan bersama. Oleh karena itu, pelaksanaan program PHBM sudah berjalan dengan baik berdasarkan peran *stakeholder* pada program PHBM di Desa Ngancar.

Penelitian terdahulu yang dapat mendukung yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016), menyatakan bahwa pada analisis stakeholder menggunakan *aktor grid*, tingkat kepentingan stakeholder yang berada di posisi kuadran II (*player*) adalah Perum Perhutani dan LMDH. Kedua *stakeholder* tersebut merupakan *stakeholder* utama pada pelaksanaan program PHBM yang mana keduanya sebagai pelaksana dan pembuat kebijakan terkait dengan pelaksanaan PHBM.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Pelaksanaan program PHBM di Desa Ngancar sudah berjalan dengan baik sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam SK Direksi Perum Perhutani No.682 tahun 2009, namun masih ada beberapa yang menjadi perhatian yaitu mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh LMDH Lancar Jaya yaitu membina serta memberikan pemahaman kepada anggotanya untuk tidak mengalihkan lahan garapannya kepada pihak lain. Selain itu belum adanya pembinaan lanjutan dari Perum Perhutani mengenai pemasaran hasil pertanian petani desa melalui koperasi LMDH sehingga membantu petani dalam menjual hasil pertaniannya.
2. Pendapatan usahatani dengan pola tanam variasi antara tanaman jagung, cabai dan tomat memberikan tingkat pendapatan yang tinggi. Hal ini dikarenakan musim tanam komoditas tersebut yang relatif pendek sehingga dalam satu tahun petani dapat melakukan usahatani tiga kali sehingga pendapatannya juga ikut meningkat. Sedangkan usahatani dengan pola tanam variasi nanas dan tanaman semusim memberikan pendapatan yang relatif rendah. Hal tersebut karena musim tanam nanas yang panjang sehingga dalam setahun petani hanya bisa melakukan satu hingga dua musim tanam saja.
3. Analisis peran *stakeholder* pada Program PHBM di Desa Ngancar berjalan efektif. Peran *stakeholder* yang efektif dapat terlihat dari tingginya tingkat kepentingan suatu *stakeholder*. *Stakeholder* yang menunjukkan kepentingan yang tinggi terletak pada kuadran II (*player*). Berdasarkan hasil analisis menggunakan *actor grid*, kepentingan *stakeholder* yang menempati posisi di kuadran II yaitu LMDH Lancar Jaya dan Perum Perhutani yang merupakan *stakeholder* utama dalam pelaksanaan program PHBM. Berdasarkan keterlibatan aktor, maka program PHBM di Desa Ngancar berjalan efektif.

6.2 Saran

1. Saran kepada LMDH Lancar Jaya yaitu mengadakan pertemuan rutin secara berkala di setiap dusun dan mengadakan beberapa kegiatan dengan anggota LMDH. Bagi yang telah melakukan penyimpangan, diberikan peringatan awal dan diberikan pembinaan lebih lanjut.
2. Kegiatan usahatani yang dilakukan masyarakat sebaiknya melakukan usahatani dengan pola tanam tanaman semusim dalam satu tahun karena akan memberikan peningkatan pendapatan dalam usahatani di lahan Perhutani.
3. Saran bagi Perhutani yaitu perhutani diharapkan lebih transparan terhadap hasil *share* tanaman kayu tebangan dari Perum Perhutani kepada LMDH Lancar Jaya. Selain itu, penambahan usaha produktif bagi masyarakat seperti pemberian hewan ternak sebagai penghasilan tambahan bagi masyarakat.
4. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dengan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbandingan pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dengan lokasi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- CIFOR. t.t. *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)*. Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR). UGM. Yogyakarta.
- Desa Ngancar. 2017. *Profil Desa Ngancar*. Kediri
- Hernanto Y. 2007. *Partisipasi dan pendapatan masyarakat dalam program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat: kasus di Desa Magelang, RPH Mugas, BKPH Mangkang, KPH Kendal, Perum Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah*. Jurnal IPB Bogor
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kementrian Kehutanan RI. 2017. *Kondisi Hutan Indonesia*. Retrieved from <http://ppid.menlhk.go.id/hutan.php?id=12>. Diakses pada April 2018.
- Konferensi Tenure. 2017. *Perempuan dan Politik Agraria Baru*. Jakarta
- [KPH] Kesatuan Pemangkuan Hutan Kediri. 2016. *Profil KPH Kediri dan Luasan BKPH tahun 2016*. Kediri: KPH Kediri
- Kurniawan. 2011. Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kawasan KPH Telawa. Jurnal Skripsi. Semarang
- LMDH Lancar Jaya. 2017. *Profil Lancar Jaya*. Kediri
- Mahadi. 2013. *Analisis Stakeholder Mapping: Studi Kasus Pada Professional Products Division L'OREAL Indonesia Periode Januari-Juni*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mayrowani *et al.*, 2011. *Pengembangan Agroforestry Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Dan Pemberdayaan Petani Sekitar Hutan*. Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian: Bogor.
- Miles, M. B., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis Third Edition*. London: Sage Publication Ltd.
- Mukminatn, Rona Desi. 2015. *Analisis Kelayakan Usahatani Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usahatani Pada Program PHBM (Studi Kasus pada RPH Sidoharjo, BKPH Sukun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Universitas Brawijaya: Malang
- Nugroho. 2011. *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Melalui Penguatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)*. Jurnal UNMER. Madiun.
- Puspita. Maharani, 2016, *Studi Evaluasi terhadap Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2014*, Jurnal Skripsi UNDIP. Diponegoro

- Pusat Hukum Dan Humas BPN RI, 1999. *UU RI No.41 Tahun 2009 Tentang Kehutanan*:Jakarta
- Ramadhani, 2012. *Dampak Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang*. Skripsi. Universitas Brawijaya:Malang
- Rosyadi. 2014. *Relasi Kuasa Antara Perum Perhutani dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Banyumas*. Jurnal UNSOED. Jawa Tengah.
- Sari, M. Y. 2016. *Evaluasi Ekonomi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di Desa Ngancar, KPH Indramayu*. IPB.
- Shinta, Agustina. 2011. *Ilmu Usahatani*. Malang. UB press.
- Soemarno.2004. *Model Pengelolaan Sumberdaya Hutan*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Soekartawi. 2003. *Analisis Usahatani*.Universitas Indonesia : Jakarta
- Soekirno. 2004. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. PT. Raja Grafindo, Jakarta
- SK Direksi Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001. 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat*.
- SK Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009. 2009. *Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat*.
- Sudarsono. 2016. *Pedoman Monitoring Dan Evaluasi PHBM. Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara (SAMANTA)*. Mataram.
- Sukhmawati. 2012. *Partisipasi Masyarakat Desa Hutan Dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di Kph Cepu Perum Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah*. Jurnal IPB. Bogor
- Umar, Husein. 2001. *Metode Peneitian untuk Skripsi dan Tesis*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Margono.2004. *Metode Peneitian untuk Skripsi dan Tesis*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- World Agroforestri Centre. 2009. *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) : Pembelajaran Keberhasilan dan Kegagalan Program*. ICRAF. Bogor.

Lampiran 1. Kuesioner Analisis Pendapatan



SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jalan Veteran, Ketawanggede, Lowokwaru, Ketawanggede,
 Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

KUESIONER ANALISIS PENDAPATAN UNTUK ANGGOTA LMDH

No. Kuesioner :
 Tanggal wawancara :
 Nama responden :
 Alamat :
 Desa/ Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

A. Karakteristik Responden

1. Nama :
2. Umur : tahun
3. Jenis kelamin : [1] Laki-Laki [2] Perempuan
4. Status Pernikahan: [1] Menikah [2] Belum Menikah
5. No HP :
6. Pendidikan formal terakhir :
7. Jumlah tanggungan keluarga : orang
8. Pekerjaan:

B. Karakteristik Usahatani

1. Jenis tanaman yang ditanam :
2. Jenis usaha tani : [1] Monokultur [2] Multikultur
 Jika multikultur, tanaman lainnya:
3. Luas Lahan:

No	Jenis Tanaman	Luas Lahan (Ha)
1		
2		
3		
4		

4. Pengelolaan: [1] Digarap sendiri [2] Digarap orang lain
5. Pengalaman usahatani : tahun
6. Waktu tanam/Pola Tanam : per tahun

No	Waktu Tanam (bln)	Komoditas
1		
2		
3		
4		

7. Status usahatani *) : [1] Penghasilan utama [2]
 Penghasilan sampingan

Besarnya pendapatan: Rp
 *) dilihat dari curahan waktu kerja

8. Produksi

Produksi	Jawaban	Keterangan
Produksi Usahatani		Kg/Ha/MT
Harga		Rp/Kg
Total Penerimaan		Rp

9. Jika sebagai pekerjaan sampingan/utama, sebutkan pekerjaan lain: Besarnya pendapatan lain : Rp
10. Tergabung dalam kelompok tani/hutan : [1] Ya [2] Tidak
 Jika Ya, nama kelompok tani/hutan : ,
 tergabung sejak tahun:
 Peran dalam kelompok tani sebagai:
11. Tergabung dalam koperasi : [1] Ya [2] Tidak
 Jika Ya, nama koperasi : , tergabung sejak tahun:
 Peran dalam koperasi sebagai:
12. Jenis lahan : [1] Irigasi [2] Tadah hujan [3] Tegalan
13. Sumber modal usahatani:
 [1] Sendiri [5] Pinjaman dari pedagang pengumpul
 [2] Koperasi [6] Pelepas uang (rentenir)
 [3] Pinjaman bank [7] Saudara
 [4] Pinjaman pedagang input [8] Lainnya
 Besarnya modal : Rp
 Bunga pinjaman:
14. Memperoleh input produksi dari : [1] sendiri [2] koperasi [3] bantuan
 Jika berasal dari koperasi inpiut produksi berupa:

No	Input Produksi	Satuan	Jumlah	Nilai (Rp)

Jika berasal dari bantuan input produksi berupa:

No	Input Produksi	Jumlah	Asal Bantuan

C. Keuntungan

No. Responden	Total Biaya (Rp)	Total Penerimaan (Rp)	Keuntungan (Rp)

D. Komponen Biaya

1. Input produksi yang digunakan:

No	Jenis input	satuan	Volume	Harga (Rp/unit)	Jumlah (Rp)
1.	Benih				
2	Pupuk				
	a. Pupuk organik				
	1. P. Kompos				
	2. P. Kandang				
	3.				
	4.				
	b. Pupuk anorganik				
	1. Urea				
	2. TSP				
	3. KCL				
	4. Phoska				
	5. NPK				
	6.				
	7.				
3	Obat-obatan				
	1) Padat				
	a.				
	b.				
	2) Cair				
	a.				
	b.				
Total Biaya Input Produksi					

2. Alat yang digunakan:

No	Jenis Alat	Jumlah (unit)	Nilai Pembelian (Rp)	Waktu Pembelian (tahun)	Estimasi Umur Ekonomis (tahun)	Biaya Penyusutan
1	Cangkul					
2	Ember					
3	Sekop					
4	Traktor					
5	Gembor					
6						
7						
Total Biaya Penyusutan						

3. Tenaga kerja pada usahatani:

No	Jenis Pengerjaan	Waktu Penyelesaian		Jmlah TK total (org/ panen)	TK dalam keluarga (org)		TK luar keluarga (org)		Upah (Rp/HOK)		Biaya Tenaga Kerja (Rp)
		Hari	Jam		L	P	L	P	L	P	
1	Persiapan Lahan										
	Pembersihan lahan										
	Pengolahan lahan										
2	Persemaian										
	Penanaman benih										
	Pemupukan										
	Pembuatan bendengan										
3	Penanaman										
4	Pemeliharaan										
	Penyiangan 1										
	Penyiangan 2										
	Penyiangan 3										
	Pemupukan 1										
	Pemupukan 2										
	Pemupukan 3										
	Penyemprotan 1										
	Penyemprotan 2										
	Penyemprotan 3										
5	Pemanenan										
	Panen										
	Pengangkutan										
Total Biaya											

Lampiran 2. Kuesioner Stakeholder PHBM



**SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Jalan Veteran, Ketawanggede, Lowokwaru, Ketawanggede,
Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

KUESIONER *STAKEHOLDER* PHBM

1. Nama Responden :
2. Nama Instansi/ Kelompok :
.....
3. Jabatan :
4. Alamat Kantor :
5. No. Telp :
6. E – mail :
7. Latar Belakang Pendidikan : 1) Tidak tamat SD/ sederajat
2) SD/ sederajat
3) SMP/ sederajat
4) SMA/ sederajat
5) Diploma
6) Sarjana (S1/S2/S3)

B. Informasi Umum

1. Apa yang anda ketahui mengenai PHBM?

.....
.....
.....
.....
.....

2. Apa perbedaan sebelum dan setelah adanya PHBM di Desa Ngancar ?

.....
.....
.....
.....

C. Tingkat Kepentingan *Stakeholder* dalam Kegiatan PHBM di Desa Ngancar

3. Bagaimanakah bentuk keterlibatan lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara dalam kegiatan PHBM di Desa Ngancar?

.....
.....
.....
.....
.....

4. Manfaat apa sajakah yang diperoleh lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara dari kegiatan PHBM di Desa Ngancar?

.....

.....

 5. Bagaimanakah bentuk kewenangan lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara dalam kegiatan PHBM di Desa Ngancar ?

.....

 6. Apa sajakah program kerja lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara yang terkait kegiatan PHBM di Desa Ngancar? Berapa persenkah program kerja tersebut dalam Tupoksi lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara?

.....

 7. Bagaimanakah tingkat ketergantungan lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara berdasarkan sumber pendapatan yang diperoleh dari kegiatan PHBM di Desa Ngancar? Berapa persenkah hasil yang diperoleh lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara?

.....

 8. Berapa lama anda terlibat dalam kegiatan PHBM di Desa Ngancar ?

Tabel 1. Penilaian tingkat kepentingan *stakeholder* dalam kegiatan PHBM di Desa Ngancar

No	Unsur	Sub Unsur	Jawaban	5	4	3	2	1
1	Keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam kegiatan PHBM di Desa Ngancar	a. Perencanaan kegiatan PHBM di Desa Ngancar b. Pengorganisasian kegiatan PHBM di Desa Ngancar c. Pelaksanaan kegiatan PHBM di Desa Ngancar d. Pengawasan/evaluasi PHBM di Desa Ngancar						

Keterangan *Scoring*: Skor 5 : Terlibat semua kegiatan
 Skor 4 : Terlibat dalam 3 kegiatan
 Skor 3 : Terlibat dalam 2 kegiatan
 Skor 2 : Terlibat dalam 1 kegiatan
 Skor 1 : Tidak terlibat kegiatan

No	Unsur	Sub Unsur	Jawaban	5	4	3	2	1
2	Manfaat kegiatan PHBM di Desa Ngancar bagi <i>stakeholder</i>	a. Sumber penerimaan b. Menciptakan lapangan kerja c. Membuka akses d. Mendorong pembangunan Daerah						

Keterangan *Scoring*: Skor 5 : Terlibat semua kegiatan
 Skor 4 : Terlibat dalam 3 kegiatan
 Skor 3 : Terlibat dalam 2 kegiatan
 Skor 2 : Terlibat dalam 1 kegiatan
 Skor 1 : Tidak terlibat kegiatan

No	Unsur	Sub Unsur	Jawaban	5	4	3	2	1
3	Kewenangan <i>stakeholder</i> dalam kegiatan PHBM di Desa Ngancar	a. Perlindungan dan pengamanan tanaman utama pada PHBM b. Pembangunan sarana dan prasarana c. Memberikan layanan perijinan d. Penyediaan data/informasi						

Keterangan *Scoring*: Skor 5 : Terlibat semua kegiatan
 Skor 4 : Terlibat dalam 3 kegiatan
 Skor 3 : Terlibat dalam 2 kegiatan
 Skor 2 : Terlibat dalam 1 kegiatan
 Skor 1 : Tidak terlibat kegiatan

No	Unsur	Sub Unsur	Jawaban	5	4	3	2	1
4	Curahan waktu <i>stakeholder</i> dalam kegiatan PHBM di Desa Ngancar	a. Sangat prioritas b. Prioritas c. Cukup prioritas d. Kurang prioritas e. Tidak Prioritas						

Keterangan Scoring

Skor 5 : Sangat prioritas, jika seluruh kegiatan *stakeholder* hanya fokus dalam pengelolaan PHBM di Desa Ngancar

Skor 4 : Prioritas, jika 80% kegiatan *stakeholder* dalam pengelolaan PHBM di Desa Ngancar

Skor 3: Cukup prioritas, jika 60% kegiatan *stakeholder* dalam pengelolaan PHBM di Desa Ngancar

Skor 2 : Kurang prioritas, jika 40% kegiatan *stakeholder* dalam pengelolaan PHBM di Desa Ngancar

Skor 1 : Tidak prioritas, jika kurang dari 20% kegiatan *stakeholder* dalam pengelolaan PHBM di Desa Ngancar

No	Unsur	Sub Unsur	Jawaban	5	4	3	2	1
5	Tingkat ketergantungan <i>stakeholder</i> terhadap kegiatan PHBM di Desa Situraja	a. Sangat Tinggi b. Tinggi c. Sedang d. Rendah e. Sangat Rendah						

Keterangan Scoring

Skor 5 : Sangat tinggi, 81- 100% , PHBM di Desa Ngancar sebagai sumber pendapatan *stakeholder*

Skor 4 : Tinggi, 61-80%, PHBM di Desa Ngancar sebagai sumber pendapatan *stakeholder*

Skor 3 : Sedang, 41-60%, PHBM di Desa Ngancar sebagai sumber pendapatan *stakeholder*

Skor 2 : Rendah, 21-40%, PHBM di Desa Ngancar sebagai sumber pendapatan *stakeholder*

Skor 1 : Sangat rendah, kurang dari 21 % , PHBM di Desa Ngancar sebagai sumber pendapatan *stakeholder*

C. Tingkat Pengaruh *Stakeholder* dalam Kegiatan PHBM di Desa Ngancar

3. Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memberikan pengaruh terhadap lembaga/kelompok lain dalam kegiatan PHBM di Desa Ngancar?

4. Lembaga/ kelompok mana sajakah yang dipengaruhi?

5. Bagaimana cara lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara mempengaruhi sesuai dengan kondisi lembaga/instansi/kelompok tersebut?

6. Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memberikan sanksi untuk mempengaruhi lembaga/kelompok lain dalam kegiatan PHBM di Desa Ngancar?

7. Bentuk sanksi apa yang diberlakukan dan kapankah sanksi tersebut diberikan kepada lembaga/kelompok lain?

8. Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memberikan bantuan kepada pihak lain terkait dengan kegiatan PHBM di Desa Ngancar? Apa sajakah bentuk bantuan tersebut?

9. Apakah terdapat kekuatan pribadi di dalam lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara? Darimanakah kekuatan kepribadian tersebut?

10. Bagaimana kewenangan organisasi dari lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara dalam kegiatan PHBM di Desa Ngancar?

-
-
11. Seberapa besarkah kekuatan anggaran dana yang dialokasikan untuk kegiatan PHBM di Desa Ngancar?
-
-
-
-
12. Berapakah jumlah SDM yang dimiliki oleh lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara dan bagaimanakah klasifikasi pendidikan SDM tersebut?
-
-
-
-
13. Bagaimanakah cakupan jejaring kerja yang dilakukan lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara?
-
-
-
-

Tabel 2. Penilaian tingkat pengaruh stakeholder dalam kegiatan PHBM di Desa Ngancar

No	Unsur	Sub Unsur	Jawaban	5	4	3	2	1
1	Peran dan partisipasi stakeholder dalam PHBM di Desa Ngancar	a. Pemberian gaji/upah (kontribusi dana) b. Penyediaan lahan c. Pemberian bantuan/kegiatan (kontribusi SDM) d. Pemberian penghargaan						

Keterangan *Scoring*

Skor 5 : Berperan dalam semua unsur
 Skor 4 : Berperan dalam 3 unsur
 Skor 3 : Berperan dalam 2 unsur
 Skor 2 : Berperan dalam 1 unsur
 Skor 1 : Tidak berperan



No	Unsur	Sub Unsur	Jawaban	5	4	3	2	1
2	Kewenangan <i>Stakeholder</i> dalam interaksi terkait kegiatan PHBM.	a. Mengadakan forum untuk membahas (opini/pendapat) kegiatan PHBM b. Mengadakan pelatihan ataupun penyuluhan terkait kegiatan PHBM. c. Memberikan bimbingan terkait teknis pemeliharaan tanaman utama d. Mengubah aturan kegiatan PHBM.						

Keterangan *Scoring*

Skor 5 : Jika mampu melakukan interaksi dalam 4 kegiatan

Skor 4 : Melakukan interaksi dalam 3 kegiatan

Skor 3 : Melakukan interaksi dalam 2 kegiatan

Skor 2 : Melakukan interaksi dalam 1 kegiatan

Skor 1 : Tidak melakukan interaksi dalam kegiatan

No	Unsur	Sub Unsur	Jawaban	5	4	3	2	1
3	Kontrol dan pengawasan stakeholder dalam kegiatan PHBM	a. Memberikan sanksi administrasi b. Memberikan sanksi finansial c. Memberikan sanksi moral d. Memberikan sanksi hukum						

Keterangan *Scoring*

Skor 5 : Jika dapat memberikan semua sanksi

Skor 4 : Memberikan 3 sanksi

Skor 3 : Memberikan 2 sanksi

Skor 2 : Memberikan 1 sanksi

Skor 1 : Tidak dapat memberikan sanksi

No	Unsur	Sub Unsur	Jawaban	5	4	3	2	1
4	Kekuatan pribadi <i>stakeholder</i> terkait kegiatan PHBM	a. Karisma <i>stakeholder</i> b. Kekuatan fisik c. Kecerdasan mental/spiritual d. Kekayaan						

Keterangan Scoring

Skor 5 : Jika mempunyai semua kekuatan kepribadian

Skor 4 : Mempunyai 3 kekuatan kepribadian

Skor 3 : Mempunyai 2 kekuatan kepribadian

Skor 2 : Mempunyai 1 kekuatan kepribadian

Skor 1 : Tidak dapat mempunyai kekuatan kepribadian

No	Unsur	Sub Unsur	Jawaban	5	4	3	2	1
5	Kapasitas/kondisi sumberdaya yang disediakan <i>stakeholder</i> dalam mendukung kegiatan PHBM.	a. Anggaran mencukupi b. SDM sesuai dengan bidang keahlian c. Fasilitas yang disediakan mencukupi d. Tersedia informasi yang akurat						

Keterangan Scoring

Skor 5 : Jika semua sumberdaya sesuai kapasitasnya

Skor 4 : Terdapat 3 sumberdaya yang sesuai kapasitasnya

Skor 3 : Terdapat 2 sumberdaya yang sesuai kapasitasnya

Skor 2 : Terdapat 1 sumberdaya yang sesuai kapasitasnya

Skor 1 : Tidak terdapat sumberdaya yang sesuai kapasitasnya

Lampiran 3. Karakteristik Responden

No	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Bertani Nanas (Tahun)
1	50	L	SMP	24
2	39	L	SMP	21
3	47	L	SMP	12
4	42	L	SD	18
5	36	L	SMP	20
6	35	L	SMP	33
7	51	L	SD	21
8	47	L	SD	21
9	38	L	SMP	30
10	46	L	SMP	23
11	39	L	SMA	16
12	36	L	SD	13
13	45	L	SMP	20
14	30	L	SMP	24
15	34	L	SD	25
16	41	L	SD	15
17	50	L	SMP	23
18	37	L	SMA	13
19	34	L	SD	18
20	56	L	SD	24
21	45	L	SMP	22
22	63	L	SD	20
23	45	L	SMP	16
24	47	L	SD	26
25	62	L	SD	22
26	39	L	SMP	23
27	48	L	SMP	21
28	43	L	SD	10
29	44	L	SD	25
30	54	L	SD	17
31	45	L	SD	35
32	40	L	SMP	20
33	49	L	SD	32
34	39	L	SD	35
35	32	L	SD	22
36	41	L	SMP	21
37	36	L	SD	26
38	61	L	SD	23
39	45	L	SMP	35
40	39	L	SD	23

Lampiran 4. Analisis Pendapatan Petani Pola Tanam Nanas

Responden	Luas Lahan (ha)	Pola Tanam	TFC	TVC	TC	TR	Pendapatan	R/C Rasio
1	0.2	Nanas	58000	2354000	2412000	6300000	3888000	2,1
2	0.1	Nanas	33500	1299375	1332875	4800000	3467125	2,1
3	0.3	Nanas	67000	3111500	3178500	9900000	6721500	2,1
4	0.1	Nanas	34000	1294250	1328250	6750000	5421750	2,3
5	0.1	Nanas	33500	1422750	1456250	4830000	3373750	2,3
6	0.2	Nanas	38000	2287800	2325800	9360000	7034200	2,2
7	0.1	Nanas	33500	1473250	1506750	6300000	4793250	2,1
8	0.1	Nanas	36500	1324075	1360575	5250000	3889425	2,1
9	0.1	Nanas	37000	1355050	1392050	5880000	4487950	2,2
10	0.1	Nanas	31000	1391500	1422500	6750000	5327500	2,1
	0.14		40200	1731355	1771555	6612000	4840445	2,1
	1		285420	12292620.5	12578040.5	46945200	34367159.5	

Lampiran 5. Analisis Pendapatan Petani Pola Tanam Jagung, Cabai dan Jagung

Responden	Luas Lahan (ha)	Pola Tanam	TFC	TVC	TC	TR	Pendapatan	R/C Rasio
11	0.1	Jgg,Cabai,Jgg	129444	7423250	7552694	13900000	6347306	2,5
12	0.1	Jgg,Cabai,Jgg	113333	7337125	7450458	12750000	5299542	2,5
	0.1		121389	7380188	7501576	13325000	5823424	2,5
	1		1213889	73801875	75015764	133250000	58234236	

Lampiran 6. Analisis Pendapatan Petani Pola Tanam Jagung, Tomat dan Cabai

Responden	Luas Lahan (ha)	Pola Tanam	TFC	TVC	TC	TR	Pendapatan	R/C Rasio
13	0.3	Jgg, Tomat, Cabai	395611	20740625	21136236	35500000	24863764	2.2
14	0.1	Jgg, Tomat, Cabai	183917	4760583.333	4944500	19500000	17555500	4.6
15	0.1	Jgg, Tomat, Cabai	182389	5047750	5230139	15510000	12379861	3.4
16	0.1	Jgg, Tomat, Cabai	180167	7292250	7472417	15380000	12407583	2.7
17	0.1	Jgg, Tomat, Cabai	181139	7235250	7416389	16500000	12083611	2.6
18	0.1	Jgg, Tomat, Cabai	178639	7301375	7480014	16950000	11569986	2.5
19	0.1	Jgg, Tomat, Cabai	198778	7005250	7204028	15430000	9525972	2.3
20	0.1	Jgg, Tomat, Cabai	166278	6747500	6913778	17050000	10786222	2.6
21	0.2	Jgg, Tomat, Cabai	323278	12483625	12806903	25600000	12143097	1.9
22	0.1	Jgg, Tomat, Cabai	168917	7381375	7550292	17300000	12749708	2.7
23	0.1	Jgg, Tomat, Cabai	197944	7113000	7310944	17650000	14089056	2.9
24	0.1	Jgg, Tomat, Cabai	182944	7017750	7200694	13120778	6570083	1.9
	0.13		211667	8343861	8555528	18790898	10235370	2.2
	1		1608667	63413344	65022011	142810826	77788815	

Lampiran 7. Analisis Pendapatan Petani Pola Tanam Jagung, Tomat dan Jagung

Responden	Luas Lahan (ha)	Pola Tanam	TFC	TVC	TC	TR	Pendapatan	R/C Rasio
25	0.2	Jgg, Tomat, Jgg	255361	5530625	5785986	24600000	26614014	3.1
26	0.1	Jgg, Tomat, Jgg	150444	2716125	2866569	15900000	19433431	3.3
27	0.2	Jgg, Tomat, Jgg	300667	12862250	13162917	27300000	29137083	2.1
	0.17		235491	7036333.333	7271824	22600000	15328176	3.1
	1		1365846	40810733.33	42176580	131080000	88903420	

Lampiran 8. Analisis Pendapatan Petani Pola Tanam Jagung dan Nanas

Responden	Luas Lahan (ha)	Pola Tanam	TFC	TVC	TC	TR	Pendapatan	R/C Rasio
28	0.1	Jgg, Nanas	59000	1506375	1565375	8275000	6709625	2,1
	1		590000	15063750	15653750	82750000	67096250	2,1

Lampiran 9. Analisis Pendapatan Petani Pola Tanam Jagung dan Cabai

Responden	Luas Lahan (ha)	Pola Tanam	TFC	TVC	TC	TR	Pendapatan	R/C Rasio
29	0.2	Jgg, Cabai	152639	6115125	6267764	18000000	11732236	2,9
	1		763194	30575625	31338819	90000000	58661181	2,9

Lampiran 10. Analisis Pendapatan Petani Pola Tanam Cabai dan Nanas

Responden	Luas Lahan (ha)	Pola Tanam	TFC	TVC	TC	TR	Pendapatan	R/C Rasio
30	0.2	Cabai,Nanas	166917	8233500	8400417	14000000	5599583	1,7
31	0.1	Cabai,Nanas	108833	4257750	4366583	11050000	6683417	2,5
32	0.1	Cabai,Nanas	104833	4133750	4238583	11010000	6771417	2,6
	0.13		126861	5541667	5668528	12020000	6351472	2
	1		964144	42116667	43080811	91352000	48271189	

Lampiran 11. Analisis Pendapatan Petani Pola Tanam Cabai, Jagung dan Cabai

Responden	Luas Lahan (ha)	Pola Tanam	TFC	TVC	TC	TR	Pendapatan	R/C Rasio
33	0.1	Cabai,Jgg,Cabai	183194	7498500	7681694	16500000	12718306	2,7
34	0.1	Cabai,Jgg,Cabai	166528	7482000	7648528	16250000	10851472	2,4
	0.1		174861	7490250	7665111	16375000	8709889	2.5
	1		1748611	74902500	76651111	163750000	87098889	

Lampiran 12. Analisis Pendapatan Petani Pola Tanam Tomat, Jagung dan Tomat

Responden	Luas Lahan (ha)	Pola Tanam	TFC	TVC	TC	TR	Pendapatan	R/C Rasio
35	0.2	Tomat,Jgg,Tomat	406333	12828250	13234583	24900000	19165417	2,4
36	0.1	Tomat,Jgg,Tomat	210167	6549875	6760042	16550000	10439958	2,5
	0.15		308250	9689063	9997313	20725000	10727688	2.5
	1		2034450	63947812.5	65982263	136785000	70802738	

Lampiran 13. Analisis Pendapatan Petani Pola Tanam Tomat dan Nanas

Responden	Luas Lahan (ha)	Pola Tanam	TFC	TVC	TC	TR	Pendapatan	R/C Rasio
37	0.2	Tomat,Nanas	245389	6570000	6815389	15400000	8584611	2.3
38	0.1	Tomat,Nanas	142083	3802000	3944083	9380000	5435917	2.4
39	0.1	Tomat,Nanas	120833	3660000	3780833	10650000	6869167	2.8
40	0.2	Tomat,Nanas	256417	6807750	7064167	14700000	7635833	2.1
	0.15		191181	5209938	5401118	12532500	7131382	2
	1		1261792	34385588	35647379	82714500	47067121	

Lampiran 17. Hasil Analisis Stakeholder Berdasarkan Tingkat Kepentingan

No.	Stakeholder	Tingkat Kepentingan <i>stakeholder</i>					Total
		K1	K2	K3	K4	K5	Skor
1	LMDH Lancar Jaya	5	5	5	4	5	24
2	Perum Perum Perhutani	5	4	5	4	4	22
3	Dinas Kehutanan	3	4	1	2	1	11
4	Pemerintah Desa	2	5	2	1	2	12

Sumber : Data Primer (2018)

Keterangan:

- K1 : Keterlibatan *stakeholder* dalam kegiatan PHBM
 K2 : Manfaat kegiatan PHBM bagi *stakeholder*
 K3 : Kewenangan *stakeholder* dalam PHBM
 K4 : Curahan waktu *stakeholder* dalam PHBM
 K5 : Tingkat ketergantungan *stakeholder* dalam PHBM

Lampiran 18. Hasil Analisis Stakeholder Berdasarkan Tingkat Pengaruh

No.	Stakeholder	Tingkat Kepentingan <i>stakeholder</i>					Total
		P1	P2	P3	P4	P5	Skor
1	LMDH Lancar Jaya	2	3	3	3	3	14
2	Perum Perum Perhutani	3	5	3	5	5	21
3	Dinas Kehutanan	2	2	1	1	1	7
4	Pemerintah Desa	1	1	1	2	1	6

Sumber : Data Primer (2018)

Keterangan:

- P1 : Peran dan partisipasi *stakeholder* dalam PHBM.
 P2 : Kekuatan *stakeholder* dalam interaksi terkait PHBM.
 P3 : Kontrol dan pengawasan *stakeholder* dalam PHBM.
 P4 : Kekuatan pribadi *stakeholder* PHBM.
 P5 : Kapasitas sumberdaya yang disediakan *stakeholder* PHBM.

Lampiran 19. Dokumentasi



Gambar 1. Kesekretariatan LMDH Lancar Jaya (nampak depan)



Gambar 2. Kegiatan wawancara dengan pengurus LMDH Lancar Jaya



Gambar 3. Kegiatan wawancara dengan bapak Kepala Desa Ngancar



Gambar 4. Kondisi lahan masyarakat desa hutan



Gambar 5. Setelah Penebangan tanaman pokok sengon



Gambar 6. Kegiatan sosialisasi bersama KLHK, Perhutani dan masyarakat.



Gambar 7. Foto bersama dengan pengurus LMDH Lancar Jaya



Gambar 8. Foto bersama setelah sosialisasi antara KLHK, Perhutani dan LMDH.

